

Kinerja OJK 2018

Memacu Pertumbuhan



Daftar Isi

4 Kata Pengantar

7 Bab 1
Tentang OJK

13 Bab 2
Kondisi Makroekonomi dan
Perkembangan Sektor Jasa
Keuangan Indonesia

23 Bab 3
Kontribusi OJK untuk
Perkembangan Sektor Jasa
Keuangan dan Dukungan kepada
Sektor Prioritas Pemerintah

59 Bab 4
Pelaksanaan Tugas Pokok OJK

75 Bab 5
Program Strategis OJK
untuk Peningkatan Kapasitas
Organisasi

105 Bab 6
Outlook Sektor Jasa Keuangan
2019

109 Bab 7
Arah Strategis OJK 2019

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalankan tugas dan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan (SJK) pada tahun 2018 dengan baik.

.....



Optimisme yang mengawali tahun ini, pada perjalanannya tertahan oleh berbagai dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global. Di sepanjang tahun 2018, perekonomian Amerika Serikat menunjukkan perbaikan yang lebih solid sehingga mendorong terjadinya pengetatan kebijakan moneter The Fed yang lebih agresif. Tidak hanya Amerika Serikat, negara maju lainnya juga turut melakukan normalisasi kebijakan moneternya. Normalisasi kebijakan moneter negara maju ini telah mendorong terjadinya *rebalancing portfolio* dana global dari *emerging market* ke negara maju yang kemudian mendorong naiknya volatilitas pasar keuangan di *emerging market*, termasuk Indonesia. Selain itu, naiknya tensi perang dagang, tensi geopolitik dan pelemahan ekonomi di sejumlah negara berkembang turut mewarnai volatilitas pasar keuangan, khususnya di *emerging market*, begitu juga Indonesia.

Menyikapi ketidakpastian global di tahun 2018 ini, OJK bersama dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi, memelihara stabilitas sistem keuangan domestik, menjaga kepercayaan pasar serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sinergi kebijakan ini ditanggapi positif oleh pelaku pasar dan investor. Secara umum, stabilitas sektor jasa keuangan domestik juga masih terjaga dengan didukung tingkat

permodalan dan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi sektor jasa keuangan juga mencatat perbaikan terutama pertumbuhan kredit perbankan dengan tingkat risiko kredit secara umum masih terkendali. Ditengah volatilitas di pasar keuangan, penghimpunan dana di pasar modal juga masih tercatat relatif tinggi dengan jumlah emiten baru yang mencatat rekor tertinggi.

Kinerja sektor jasa keuangan tahun ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan SJK. Standar internasional pengaturan dan pengawas yang *best fit* dengan kondisi Indonesia terus kami adopsi. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan juga diluncurkan OJK dalam menghadapi tantangan yang dihadapi ekonomi kita saat ini, yaitu memfasilitasi pembiayaan untuk industri yang berorientasi ekspor, barang substitusi impor, dan industri penghasil devisa, seperti pariwisata, serta sektor dengan *multiplier effect* tinggi, yaitu perumahan.

Selain itu, beberapa kebijakan juga telah diambil untuk mendorong pengembangan produk pasar modal dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur, merevitalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar lebih berperan mendorong ekspor dan mendorong penyaluran KUR dengan skema klaster untuk pengembangan UMKM di sektor pariwisata dan ekspor serta meningkatkan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan ke sektor produktif. Dalam merespon terjadinya bencana alam di beberapa daerah, OJK telah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat dan dunia usaha di daerah terdampak bencana, seperti di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

Melengkapi kebijakan di atas, upaya pendalaman pasar keuangan dan penyempurnaan infrastrukturnya terus dilakukan, diantaranya melalui pengembangan variabilitas instrumen pembiayaan di pasar modal terutama instrumen yang dibutuhkan

dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sektor prioritas Pemerintah lainnya, percepatan waktu penyelesaian transaksi bursa dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan efisiensi operasional, serta kebijakan untuk mendorong inovasi keuangan digital, baik untuk industri keuangan maupun perusahaan *start-up fintech* dengan memberi perhatian pada aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

Beberapa inisiatif dalam rangka penguatan pengawasan sektor jasa keuangan juga telah dilakukan, antara lain menyiapkan arsitektur pengawasan sektor jasa keuangan berbasis IT dengan OBOX dan *Condensed Report* yang bertujuan mendeteksi permasalahan SJK secara dini, merespon pengawasan yang cepat dan tepat serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Selain itu, OJK terus memperluas implementasi Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi untuk percepatan proses perizinan multi sektoral. Melalui sistem ini, proses perizinan dapat dipercepat dari rerata 105 hari kerja menjadi hanya 22 hari kerja. OJK juga meluncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan pengembangan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dapat dimanfaatkan pelaku industri untuk mitigasi risiko kredit.

Menyikapi perkembangan teknologi keuangan yang begitu pesat, OJK juga telah meluncurkan *OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK Infinity)* sebagai wadah kolaborasi antara industri, regulator, pemerintah, akademisi dan innovation hub lain yang berfungsi sebagai *regulatory sandbox*, *innovation hub* dan sentra edukasi bagi industri keuangan digital.

Sementara itu, dalam rangka pengembangan UMKM dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat, OJK berkerja sama dengan lembaga/instansi terkait menginisiasi berbagai program dalam pemerataan akses keuangan, antara lain dengan program Laku Pandai (*branchless banking*), Bank Wakaf

Mikro program SIMPEL, pembentukan BUMDes Center serta optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Pemanfaatan platform teknologi keuangan dalam meningkatkan inklusi keuangan juga terus kami dorong yang salah satunya melalui *platform peer-to-peer lending*.

Beberapa inisiatif juga dilakukan untuk mendorong efektivitas upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukasi keuangan ke berbagai macam komunitas, *Online Modul E-learning* tingkat SD dan SMP dan pelaksanaan bulan inklusi keuangan. Melengkapi inisiatif peningkatan literasi keuangan, OJK terus mengoptimalkan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, diantaranya melalui penguatan pengawasan *market conduct*, *re-branding contact center* menjadi Kontak OJK 157 yang dianugerahi penghargaan dalam "*the best contact center 2018*" serta optimalisasi fungsi Satgas Waspada Investasi.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, OJK senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada pemangku kepentingan. Laporan Keuangan OJK tahun 2017 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

yang merupakan tahun ke-5 berturut-turut, menunjukkan komitmen untuk menjaga tata kelola yang baik. Selain itu, OJK juga mendapat penghargaan "Instansi dengan Penerapan LHKPN Terbaik Tahun 2018" dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seluruh Dewan Komisiner menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK selama 2018. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada seluruh jajaran pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi tinggi dalam mewujudkan visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Otoritas yang kredibel dan terpercaya dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil dan berperan nyata dalam dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**



Wimboh Santoso, Ph.D

Bab 1

Tentang OJK



• Misi dan Visi Otoritas Jasa Keuangan



Misi OJK

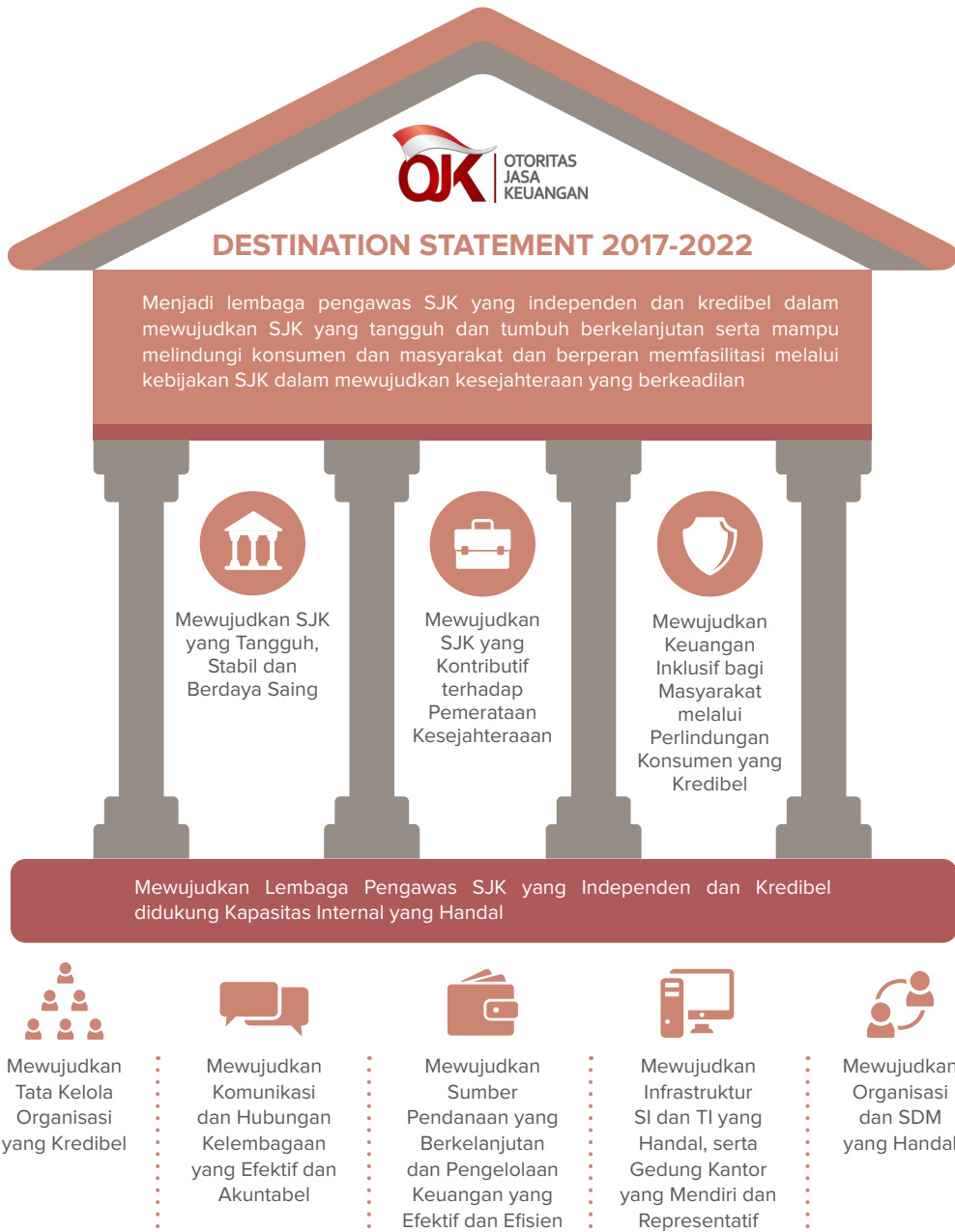
- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.



Visi OJK

- Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

• *Destination Statement* Otoritas Jasa Keuangan



• Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

	Makna Nilai	Perilaku Utama
	Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.	1. Jujur dan dipercaya 2. Bijak 3. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan
Integritas		
	Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.	1. Belajar berkelanjutan 2. Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan 3. Berkomitmen terhadap hasil karya yang berkualitas.
Profesionalisme		
	Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.	1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghargai 2. Berkomunikasi secara efektif 3. Mencari solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah
Sinergi		
	Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.	1. Menghargai keberagaman 2. Berperilaku adil 3. Partisipatif, kontributif, fasilitatif, dan edukatif.
Inklusif		
	Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (<i>forward looking</i>) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (<i>out of the box thinking</i>).	1. Mencari dan mengembangkan konsep dan ide baru 2. Melihat jauh ke depan 3. Menginspirasi dan mendukung perubahan
Visioner		

◉ Anggota Dewan Komisiner OJK

Periode 2017-2022



1. **Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D**
Ketua Dewan Komisiner
2. **Ir. Nurhaida, MBA**
Wakil Ketua Dewan Komisiner sebagai
Ketua Komite Etik
3. **Heru Kristiyana SH., MM**
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
4. **Ir. Hoesen, MM**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal
5. **Riswinandi**
Kepala Eksekutif Pengawas Industri
Keuangan Non-Bank
6. **Drs. Ahmad Hidayat, Akt.C.A MBA**
Ketua Dewan Audit
7. **Tirta Segara, SE., MBA**
Anggota Dewan Komisiner
Membidangi Edukasi dan Perlindungan
Konsumen
8. **Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA,
Ph.D, Akt., QIA, CA, Cfra**
Anggota Dewan Komisiner *Ex-Officio*
Kementerian Keuangan
9. **Mirza Adityaswara, SE, M.App. Fin**
Anggota Dewan Komisiner *Ex-Officio*
Bank Indonesia

Bab 2

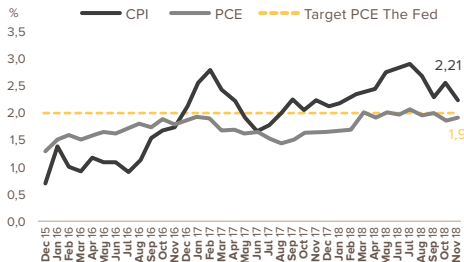
Kondisi Makroekonomi & Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia



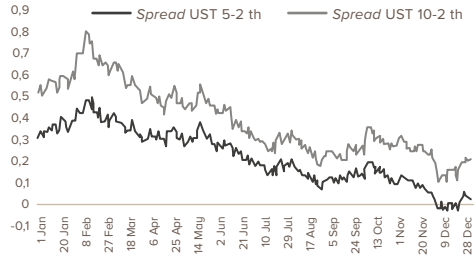
• Kondisi Perekonomian Global

Kelanjutan perbaikan ekonomi AS cenderung stagnan, *trade war* masih berlanjut...

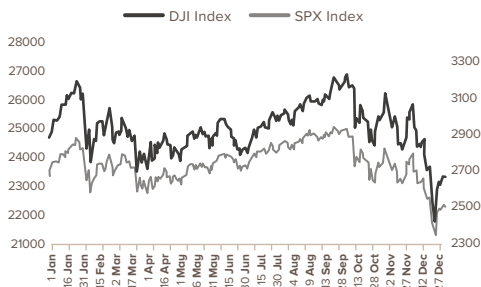
Rilis data inflasi AS belum solid dan cenderung stagnan...



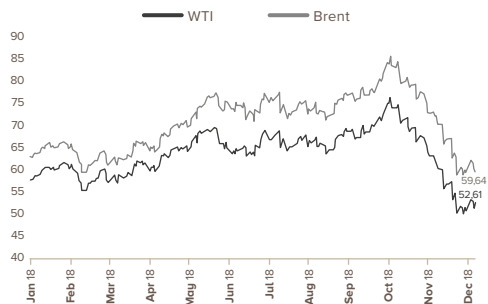
Yield curve UST jangka panjang menurun yang menunjukkan kekhawatiran investor akan pertumbuhan ekonomi AS jangka panjang...



Pasar saham AS mulai terkoreksi turun dari Oktober...



Harga minyak terus turun seiring kenaikan produksi AS dan *waiver* atas sanksi Iran...



Meskipun ada "gencatan senjata", *trade war* masih berpotensi berlanjut...

19 September

Tiongkok mengenakan tarif impor sebesar 10% terhadap produk AS senilai USD60 miliar berlaku per 24/9. Barang yang dikenakan antara lain ban dan karet sintetis.

Tiongkok juga mengancam akan menghentikan ekspor *rare earth* ke AS.

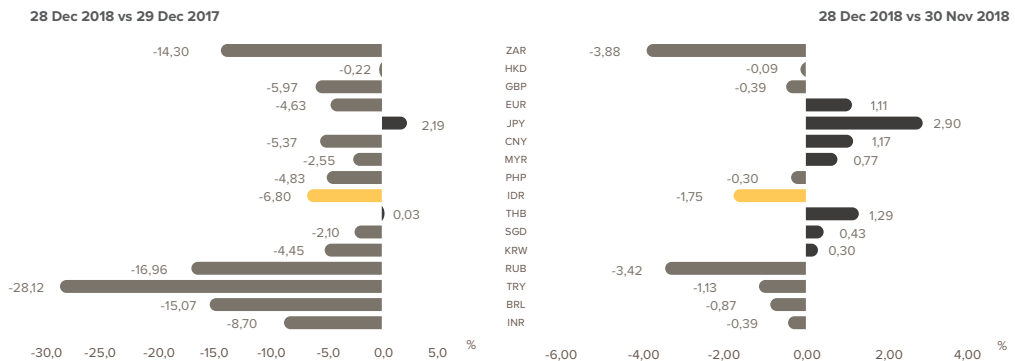
5 Desember

Setelah Trump dan Xi menyetujui untuk memberhentikan sementara perang tarif AS dan Tiongkok, kembali muncul kekhawatiran perjanjian perdamaian AS dan Tiongkok kembali gagal setelah CFO Huawei Technologies ditangkap AS yang merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Tiongkok.

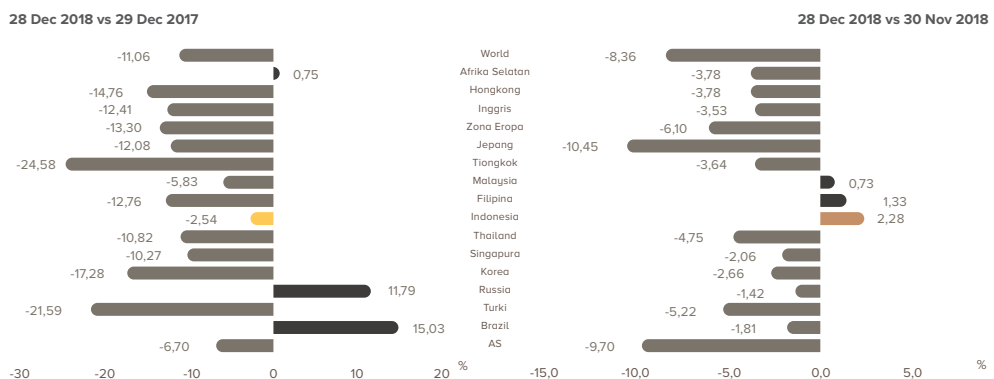
• Kondisi Perekonomian Global

Volatilitas di pasar keuangan dunia sempat meningkat di 2018, namun cenderung mereda di akhir tahun...

Nilai Tukar Global



Indeks Saham Global



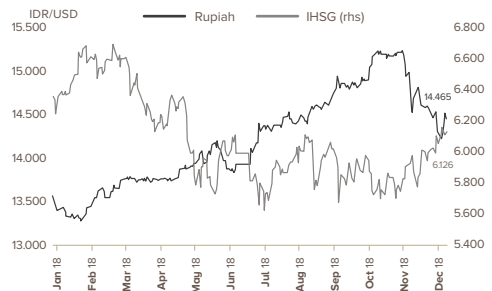
• Kondisi Perekonomian Domestik

Volatilitas pasar keuangan domestik juga menurun, diiringi *inflow* modal investor nonresiden...

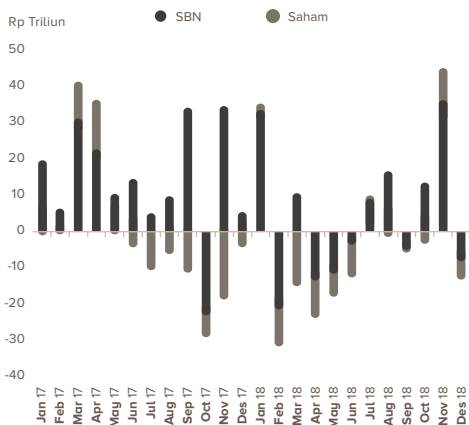
Pasar domestik masih fluktuatif seiring pasar global, namun tekanan jauh lebih moderat dibandingkan periode Februari sampai dengan Oktober 2018...

	Oktober 2018	November 2018	28 Desember 2018
IHSG	5.831,6	6.056,1	6.147,9
	-2,43% mtm	3,85% mtm	1,52% mtd
			-3,27% ytd
IDR	15.200	14.900	14.465
	Depresiasi 2,01% mtm	Apresiasi 5,92% mtm	Depresiasi 1,14% mtd
			Depresiasi 6,22% ytd

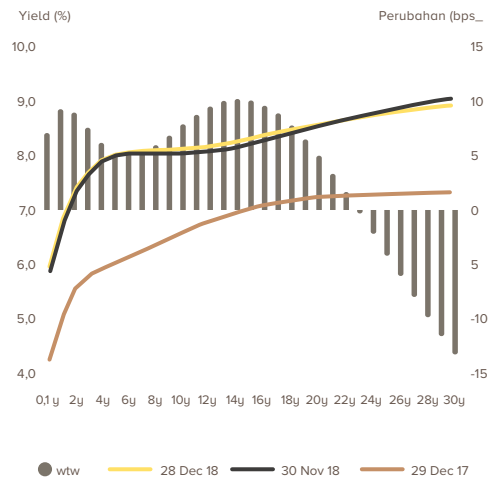
Tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar Rupiah mereda...



Di triwulan IV-2018, investor nonresiden kembali mencatat *inflow* di pasar modal domestik...



Yield curve SBN cenderung meningkat, terutama pada tenor jangka menengah...

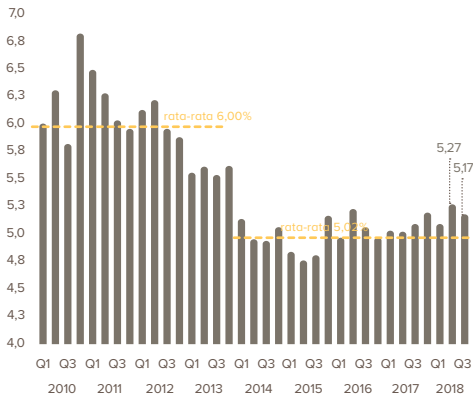


● Kondisi

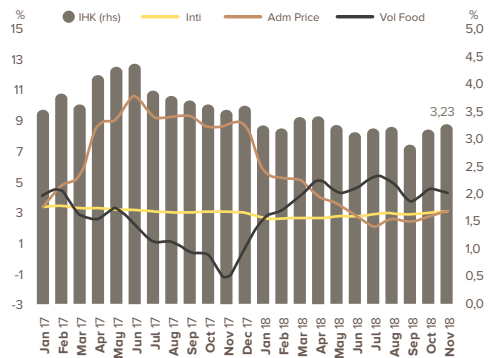
Perekonomian Domestik

Pasar keuangan Indonesia turut tertekan sebagaimana *Emerging Market* lainnya...

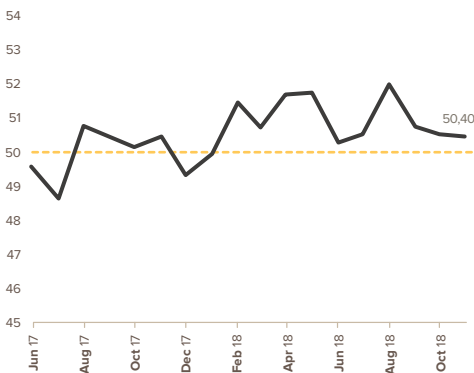
Pertumbuhan ekonomi domestik terpantau stabil...



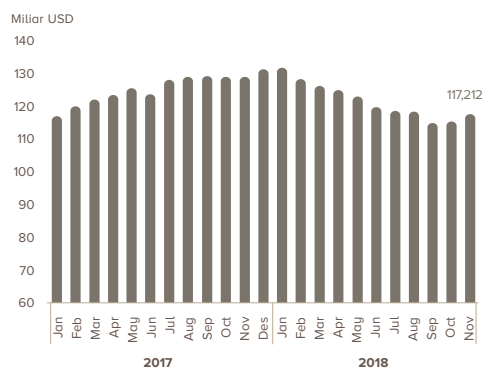
Inflasi masih dalam kisaran target...



PMI Manufaktur berada dalam zona ekspansi...

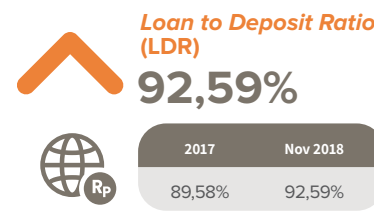
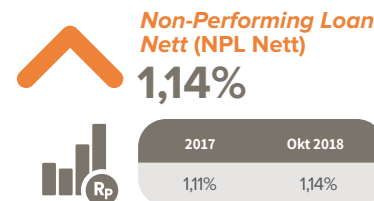
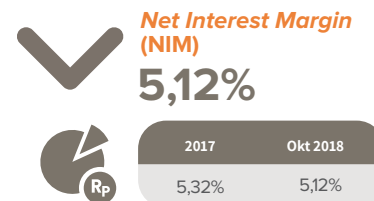
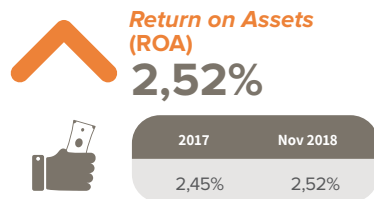
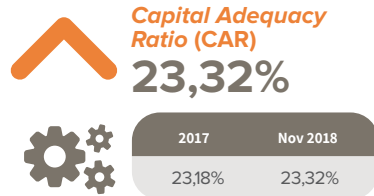
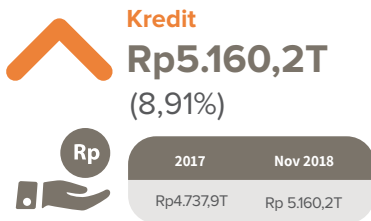


Cadangan Devisa meningkat di November 2018 seiring berkurangnya tekanan terhadap Rupiah...



Indikator Sektor Jasa Keuangan

Perbankan



data kredit dan DPK merupakan data BU,
data kinerja merupakan data BUK

• Indikator Sektor Jasa Keuangan

Pasar Modal

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
 **-161,15 poin**
 (-2,54%)



2017	28 Des 2018
6.355,65	6.194,50

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana
 **Rp47,88T**
 (10,47%)



2017	28 Des 2018
Rp457,51T	Rp505,39T

Kapitalisasi IHSG
 **-Rp28,89 T**
 (-0,41%)



2017	28 Des 2018
7.052,39	7.023,50

Indonesia Composite Bond Index
 **-2,0829 poin**
 (-0,86%)



2017	28 Des 2018
242,9842	240,9013

Jumlah Emiten Baru
 **20 Emiten**
 (31,58%)



2017	28 Des 2018
38	58

Jumlah Emisi Penawaran Umum
 **7**
 (4,35%)



2017	28 Des 2018
161	168

Nilai Emisi
 **-Rp88,44T**
 (-34,75%)



2017	28 Des 2018
Rp254,50T	Rp166,06T

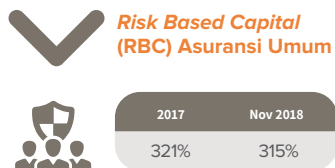
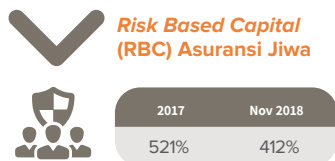
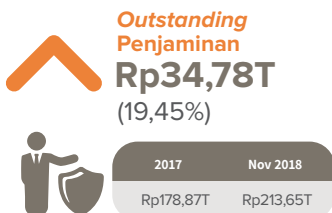


Single Investor Identification (SID)

Tahun	SID Saham	SID Reksadana	SID SBN	Keterangan
28 Des 18	852.240	995.510	195.277	- Jumlah Investor (SID Saham) dalam 5 tahun terakhir meningkat 133,83% - Sejak dibentuk SID Reksadana tahun 2014, jumlahnya telah meningkat sebesar 187,45% - Sejak dibentuk SID SBN tahun 2016, jumlahnya telah meningkat sebesar 84,76%

Indikator Sektor Jasa Keuangan

Industri Keuangan Non-Bank



● Indikator Sektor Jasa Keuangan SJK Syariah

 **Aset Perbankan Syariah (BUS + UUS)**



Rp30,7T
(7,09%)

2017	Okt 2018
Rp424,18T	Rp454,25T

 **Dana Pihak Ketiga (BUS + UUS)**



Rp21,03T
(6,28%)

2017	Okt 2018
Rp334,89T	Rp355,92T

 **Pembiayaan Syariah (BUS + UUS)**



Rp27,19T
(9,52%)

2017	Okt 2018
Rp285,69T	Rp312,88T

 **Aset IKNB Syariah**



Rp-0,47T
(-0,47%)

2017	Nov 2018
Rp99,13T	Rp98,66T

 **Piutang Pembiayaan Syariah**



Rp-8,64T
(-30,16%)

2017	Nov 2018
Rp28,65T	Rp20,01T

 **Investasi Asuransi Syariah**



Rp2,18T
(6,17%)

2017	Nov 2018
Rp35,34T	Rp37,52T

 **Jakarta Islamic Index (JII)**
-73,85 Poin
(-9,73%)



2017	28 Des 2018
759,07	685,22

 **Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)**
-5,86 Poin
(-3,09%)



2017	28 Des 2018
189,86	184,00

 **Reksa Dana Syariah**
Rp6,18T
(21,83%)



2017	28 Des 2018
Rp28,31T	Rp34,49T

 **Sukuk Negara**
Rp94,89T
(17,20%)



2017	12 Des 2018
Rp555,50T	Rp646,45T

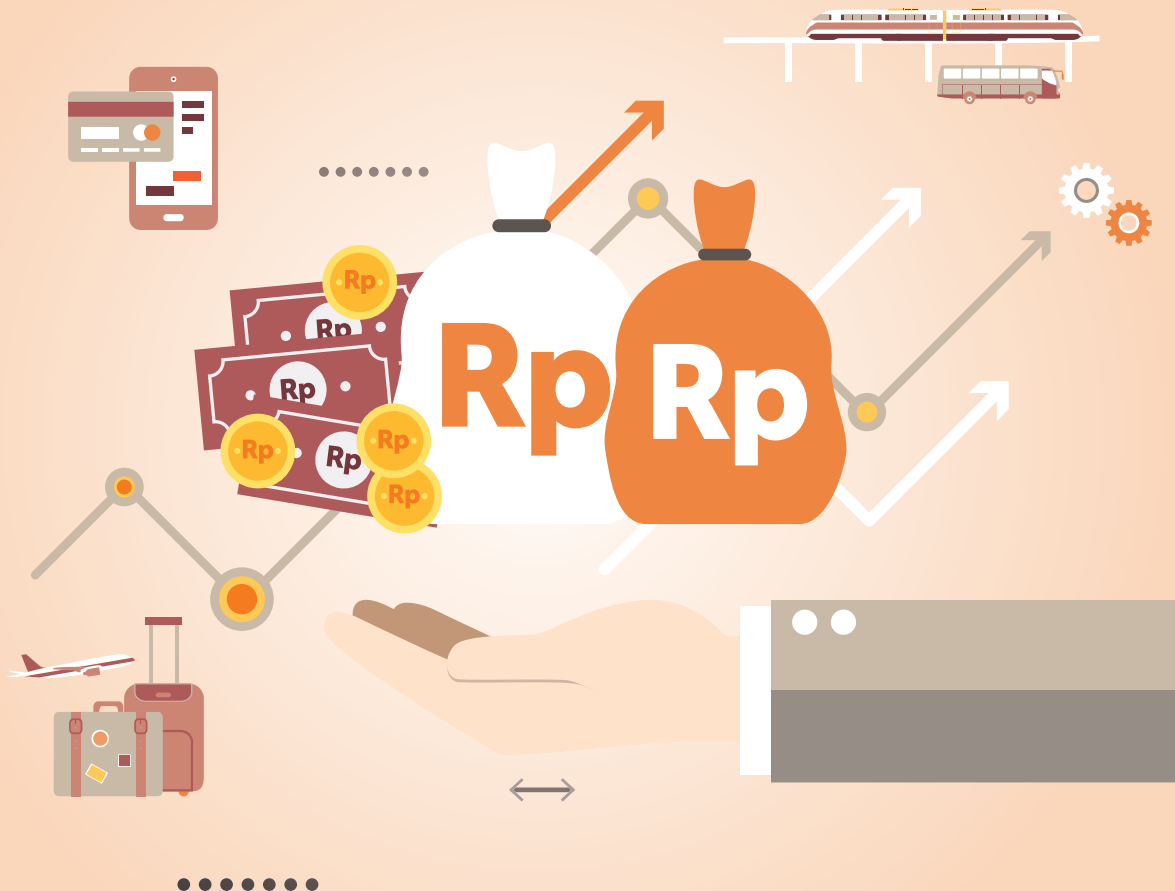
 **Sukuk Korporasi**
Rp6,28T
(39,91%)



2017	28 Des 2018
Rp15,74T	Rp22,02T

Bab 3

Kontribusi OJK untuk Perkembangan Sektor Jasa Keuangan & **Dukungan Kepada Sektor Prioritas Pemerintah**



• **Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015 -2019**



Mengoptimalkan Peran Sektor Jasa keuangan dalam mendukung percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Landasan bagi Pembangunan yang Berkelanjutan



Mewujudkan Finansial Masyarakat serta Mendukung Upaya Peningkatan dalam Pembangunan



Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas SDM



Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan

● Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Stabil

Penerbitan Kebijakan Terkait Stabilitas

OJK menerbitkan POJK No.6/ POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 7/ POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum.

Structured Product merupakan produk keuangan non-konvensional yang distruktur sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dan objektif dari nasabah atau golongan nasabah tertentu. Dengan demikian, dalam penstrukturannya diperlukan keahlian dari para pihak di berbagai bidang, baik dari aspek keuangan maupun bidang lain seperti bidang hukum dan bidang perpajakan.



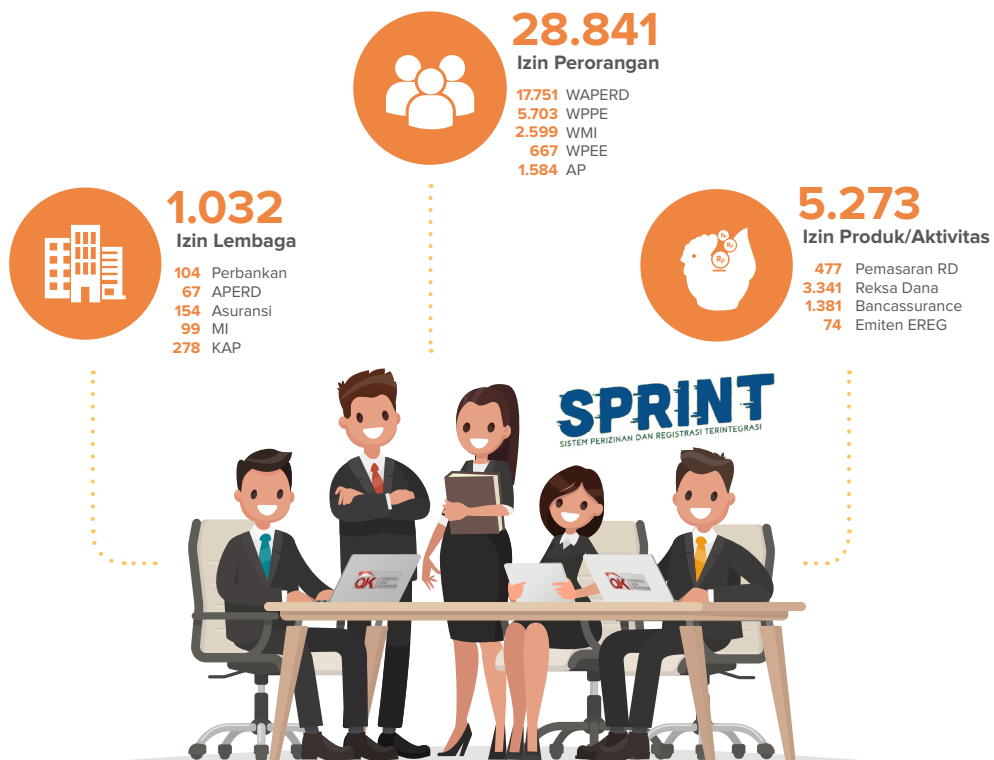
Peraturan ini diharapkan dapat lebih mendorong bank melaksanakan kegiatan *structured product* khususnya *call spread option* di pasar valas dalam negeri yang pada gilirannya akan membantu memperdalam pasar derivatif di Indonesia.

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Stabil

Kebijakan Penguatan Infrastruktur SJK

Pengembangan Infrastruktur pengawasan dan perizinan terintegrasi bertujuan untuk menciptakan kestabilan sektor jasa keuangan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).



Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Sistem Informasi yang memfasilitasi proses perizinan produk dan jasa keuangan lintas bidang dilakukan melalui satu pintu sehingga mempersingkat proses.

Bancassurance	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)	Sukuk Obligasi
101 hari menjadi 19 hari kerja	105 hari menjadi 19 hari kerja	20 hari kerja	105 hari menjadi 22 hari kerja

• Implementasi MPSJKI 2018

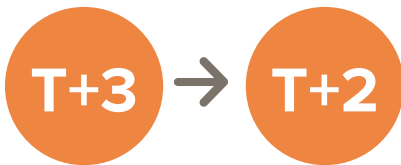
Pilar Stabil

Kebijakan Penguatan Infrastruktur SJK

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa. Hal ini menyesuaikan dengan *best practice* dalam peningkatan efisiensi penyelesaian transaksi bursa dan implementasi T+2 di pasar modal global seperti Jerman, Hongkong, India, Korea Selatan, Rusia, Taiwan, dan Thailand.



Penerbitan Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Implementasi Percepatan Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa dari



26 November 2018 merupakan hari pertama Perdagangan dengan Siklus Penyelesaian T+2 dapat disimpulkan bahwa penerapan Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 menjadi T+2 di Pasar Modal Indonesia dinyatakan sukses. Hal ini menjadi tonggak sejarah untuk Pasar Modal Indonesia, dengan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara yang telah menerapkan Siklus Penyelesaian T+2 setelah Vietnam dan Thailand.

Tujuannya meningkatkan likuiditas melalui percepatan *re-investment* dari modal investor maupun efisiensi operasional dan kapasitas transaksi Perusahaan Efek.

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Stabil

Penguatan Pengawasan SJK Berbasis Teknologi Informasi Melalui Pengembangan Aplikasi OBOX dan *Condensed Report* (LAB Baru)

DESKRIPSI

- Laporan mutasi/transaksi pos-pos tertentu
- Identifikasi dan mitigasi potensi isu/permasalahan lebih cepat
- Disertai dengan dokumen pendukung (a.l. analisis kredit/ NAK/MAK/Mutasi Rekening/ dll.)



OJK-BOX (OBOX)

Laporan Data Mutasi/
Transaksi Signifikan

DESKRIPSI

- Penyediaan informasi yang cepat, kini dan relevan dengan kebutuhan pengawas
- Sumber data dan informasi dalam Laporan Analisis Bulanan (LAB) Baru
- Menggambarkan Kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank setiap Bulan



APOLO

Laporan *Condensed Report* +
LAB BARU

MANFAAT

- Memperkuat pengawasan melalui pemantauan transaksi/mutasi pos-pos tertentu yang mempengaruhi kinerja bank
- Mempercepat identifikasi dan mitigasi awal terhadap potensi kelemahan/permasalahan bank
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan
- Menyediakan database pengawasan yang lengkap, akurat, kini dan utuh

MANFAAT

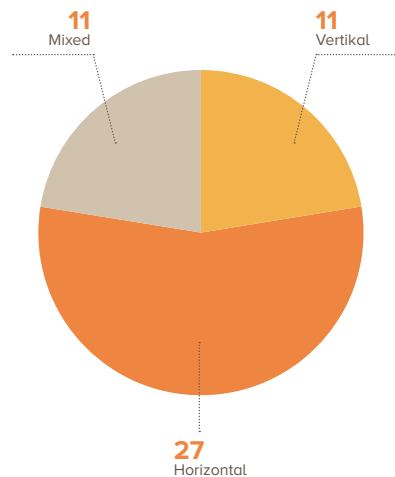
- Data dan informasi dalam LAB Baru tersedia lebih cepat
- LAB Baru disusun secara otomatis sehingga mengurangi *human error* dan mendorong pengawas untuk fokus kepada analisis (format distandarisasi).
- Analisis LAB Baru yang dihasilkan lebih tajam dan komprehensif sehingga mencerminkan gambaran kondisi kesehatan dan kinerja bank setiap bulan

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Stabil

Penguatan Pengawasan Terintegrasi

1. **Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan** adalah pengawasan berbasis risiko terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) untuk mendeteksi risiko secara dini dan mengambil tindakan secara tepat.
2. Penerbitan **Roadmap Pengawasan Terintegrasi** yang bertujuan memberikan arah kebijakan, pengembangan sistem metodologi pengawasan, dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK). Roadmap ini mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:
 - Kebijakan Pengawasan Terintegrasi terhadap KK;
 - Sistem dan Metodologi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK; dan
 - Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK.
3. *Enhancement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) Modul Data Keuangan dan FICOR (*Financial Conglomerate Ratios*).



Perkembangan Pengawasan Terintegrasi

	2015	2016	2017	Triwulan II-2018
Jumlah KK Lintas Sektor	44	43	49	49
Aset KK (Rp Triliun)	5.793	5.893	6.487	6.657
% dari total aset IJK	66,12%	67,25%	66,57%	66,48%



49
Konglomerasi
Keuangan



204
Lembaga Jasa
Keuangan



Rp 6.657 T
Total Aset

• Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Stabil

Penerapan Standar Internasional



Financial Sector Assessment Program (FSAP)

FSAP merupakan *joint program* antara IMF dan World Bank yang bertujuan mengevaluasi kondisi stabilitas sistem keuangan dan perkembangan sektor keuangan suatu negara secara komprehensif & keterkaitannya dengan negara lain dalam rangka menjaga stabilitas keuangan global.

Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)

RCAP merupakan penilaian yang dilakukan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang diterbitkan oleh Indonesia terkait kerangka Basel, baik Basel II, Basel 2.5, maupun Basel III.



Report on Standards and Codes Accounting and Auditing (ROSC A&A)

ROSC A&A merupakan asesmen yang dilakukan untuk membantu negara anggota G-20 dalam memperkuat sistem keuangannya melalui pengembangan, diseminasi, adopsi, dan penerapan standar dan kode internasional di bidang akuntansi (*International Financial Reporting Standard/IFRS*) dan di bidang auditing (*International Standard on Auditing ISA*). Diagnostic tools yang digunakan untuk menilai Indonesia mencakup tiga modul yaitu (i) Perbandingan antara standar nasional pelaporan keuangan dan standar audit Indonesia dengan IFRS dan ISA, (ii) Penilaian atas ketahanan framework laporan keuangan dan audit perusahaan Indonesia mengacu pada tolak ukur dan praktik yang diakui secara internasional, dan (iii) Praktik/ implementasi standar nasional dan framework laporan keuangan dan audit di Indonesia serta menilai persepsi atas kualitas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan. Dalam rangka mempermudah koordinasi dan kerjasama para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ROSC A&A Indonesia, telah dibentuk Tim Kerja Nasional (TKN) ROSC A&A yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan OJK, sebagai koordinator dan sekretariat TKN.



• Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Stabil

Penerbitan Kebijakan dalam Rangka Ekspor & Peningkatan Ekonomi Nasional



Sektor pariwisata membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup besar, sehingga butuh dukungan pembiayaan dari Industri Jasa Keuangan. Penyediaan pembiayaan tidak hanya dari perbankan melalui kredit ke sektor pariwisata tetapi juga melalui instrumen pasar modal seperti Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), *Blended Finance* dan Obligasi Daerah. Selain itu OJK juga akan meningkatkan peran investasi dari lembaga dana pensiun dan asuransi ke instrumen pasar modal, penerbitan asuransi perjalanan wisata, pembiayaan untuk UMKM melalui KUR Pariwisata dan *Platform Fintech peer to peer lending* dan *equity crowdfunding*.

Untuk mendukung pembiayaan sektor pariwisata melalui sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait yaitu:

1. POJK No.15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa ("POJK BMPK").
2. POJK No.17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank ("Perubahan POJK Kegiatan Usaha").

Paket Kebijakan tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor.

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Stabil

Penerbitan Kebijakan dalam Rangka Ekspor & Peningkatan Ekonomi Nasional

OJK memprioritaskan berbagai kebijakan yang bisa mempercepat pertumbuhan dan peningkatan peran industri pasar modal dalam perekonomian nasional, antara lain dengan:



Mengembangkan instrumen pasar modal sesuai kebutuhan Pemerintah dalam menyediakan pendanaan untuk pengembangan sektor prioritas, seperti sektor industri berorientasi ekspor, sektor industri substitusi barang impor, sektor pariwisata, sektor perumahan dan sektor komoditas



Memberikan alternatif instrumen pembiayaan bagi perusahaan dan instrumen investasi bagi pemodal profesional dengan mengeluarkan peraturan terkait Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk



Mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah melalui pengembangan variasi produk saham syariah seperti sukuk wakaf dan EBA syariah



Menyiapkan dasar pengaturan bagi pendirian Lembaga Pendanaan Efek yang berfungsi meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar melalui penguatan infrastruktur transaksi *margin* dan *short selling*



Menyediakan landasan pengaturan bagi kegiatan *Equity Crowdfunding* di pasar modal



Mendorong pendirian Perusahaan Efek Daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan jumlah investor retail di daerah, meningkatkan tingkat literasi dan inklusi Pasar Modal di daerah



Mengembangkan instrumen dan pasar derivatif di pasar modal untuk memberikan kenyamanan bagi investor nonresiden untuk berinvestasi di pasar modal

◦ Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Stabil

Kebijakan Khusus terkait Daerah Bencana

Perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan syariah Bank mengacu pada POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dalam Keputusan Dewan Komisiner dan akan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, meliputi hal-hal sebagai berikut:



I. Penilaian Kualitas Kredit

- Penetapan Kualitas Kredit dengan plafon maksimal Rp5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga. Sementara itu bagi kredit dengan plafon di atas Rp5 miliar, penetapan Kualitas Kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

II. Kualitas Kredit yang direstrukturasasi

- Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturasasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisiner.
- Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

III. Pemberian Kredit Baru terhadap Debitur yang Terkena Dampak

- Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.
- Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.

IV. Pemberlakuan untuk Bank Syariah

Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.

Untuk Perusahaan Pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur, antara lain, berupa:

- Rescheduling* pembayaran angsuran;
- Penyesuaian biaya administratif; dan
- Penyesuaian denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan diminta melaporkan secara berkala kepada OJK mengenai progres penanganan restrukturisasi debitur yang terkena musibah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam.

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Stabil

Penerbitan Peraturan Terkait *Financial Technology*



1. OJK menerbitkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Regulasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri LPMUBTI atau *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat. POJK ini juga untuk melindungi kepentingan konsumen dan nasional, dan pada saat yang sama menyediakan ruang bagi penyelenggara *Fintech* di Tanah Air untuk dapat tumbuh dan berkembang, serta memberi kontribusi bagi perekonomian nasional.
2. Pada 2018, OJK menerbitkan POJK No. 13/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan efisiensi operasional bank melalui pemanfaatan perkembangan TI, meningkatkan kualitas layanan keuangan kepada nasabah perbankan dengan lebih cepat, mudah dan sesuai kebutuhan serta mendorong bank untuk berinovasi dalam penggunaan TI secara bertanggung jawab. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain persyaratan bank untuk pelaksanaan Perbankan Digital, proses verifikasi nasabah atau calon nasabah dan kewajiban bank untuk membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital.

• Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)



Program pembiayaan UMKM, dan ultra mikro guna mendorong peningkatan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat daerah dimulai dari kawasan sekitar pondok pesantren.

- Salah satu tugas OJK adalah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
- OJK berinisiatif untuk mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan, yaitu dengan pendirian Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah) di lingkungan Pesantren.

	2017	November 2018
 Pembiayaan Disalurkan (Rp M)	0,658	9,72
 Peserta/Nasabah	827	8.373
 Outlet BWM	11	41



Pengembangan Bank Wakaf Mikro mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo yang turut meresmikan beberapa Bank Wakaf Mikro antara lain Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara di Serang, Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek, Cirebon dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri, Surabaya. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar silaturahmi dengan 300 orang pengurus dan nasabah Bank Wakaf Mikro yang saat ini telah beroperasi serta beberapa pimpinan pesantren yang sedang menyiapkan pendirian Bank Wakaf Mikro yang baru.

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif



Persebaran *Outlet* Bank Wakaf Mikro



Implementasi MPSJKI 2018

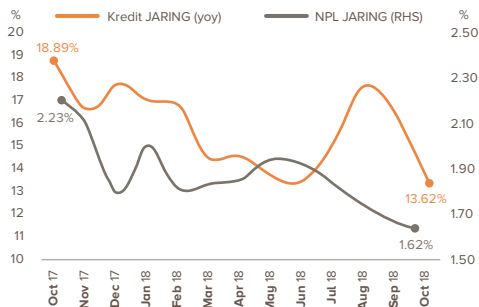
Pilar Kontributif

Jangkau-Sinergi-Guideline (JARING)

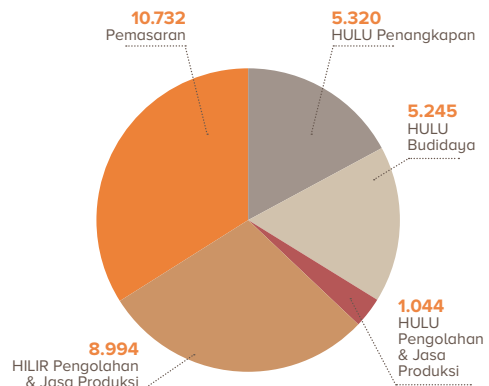


Program pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dengan realisasi penyaluran kredit sampai dengan Oktober 2018 mencapai Rp31,33 triliun atau tumbuh 13,62% (yoy). Kualitas kredit JARING juga relatif terjaga yang ditunjukkan oleh penurunan NPL menjadi 1,62%.

Pertumbuhan Kredit dan NPL JARING

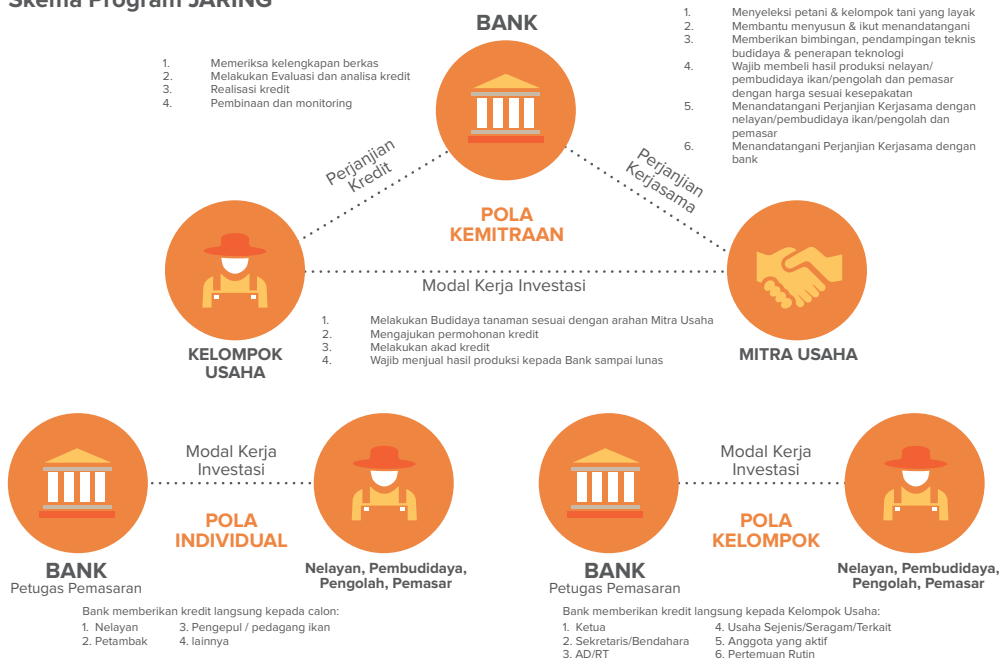


Posisi Kredit JARING (dalam Rp miliar)



*) Data Per Oktober 2018

Skema Program JARING

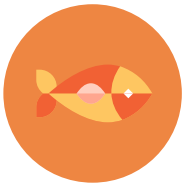


Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

Asuransi Sektor Perikanan & Kelautan

Asuransi Budidaya Ikan Kecil



Asuransi yang memberikan perlindungan risiko kepada pembudidaya atas penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas (patin, nila payau, nila tawar, bandeng, dan polikultur) yang diasuransikan atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan kerusakan sarana pembudidaya mencapai lebih dari atau sama dengan 50%.



6.914
peserta



Rp2,9 miliar
premi



10.220,6 hektar
area budidaya

Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU)



2.004
peserta



Rp1,485 miliar
premi



3.300 hektar
area budidaya



Rp525 juta
klaim

Asuransi Nelayan

Asuransi yang memberikan perlindungan bagi nelayan dari risiko saat melaut.



499.480
peserta



Rp46,15 miliar
premi



Rp21,41 miliar
klaim

^{*)} Data per 30 November 2018

• Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

Asuransi Sektor Pertanian

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Proteksi Petani dan Lahan Pertanian



901.420,56 hektar
lahan pertanian



27
provinsi



1.446.399
petani



Rp111,13 miliar
premi



Rp104,99 miliar
klaim

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bertujuan memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. OJK aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan

Bantuan Premi. OJK juga berperan dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai pelaku AUTP.

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Perlindungan Hewan Ternak



120.000 sapi
hewan ternak



27
provinsi



74.508
peternak



Rp24 miliar
premi



Rp34,52 miliar
klaim

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. AUTS tersedia bagi peternak sapi skala usaha kecil

pembibitan dan/atau pembiakan yang menjamin ternak sapi potong/perah berusia minimal 1 tahun dari kematian karena penyakit, kecelakaan, melahirkan, dan kehilangan karena pencurian.

*) Data per 30 November 2018

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif



Realisasi penyaluran KUR posisi September 2018 sebesar Rp100 triliun (80.8% dari target penyaluran Rp 123,63 T), utamanya terkonsentrasi pada sektor Perdagangan sebesar Rp56,7 T. Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (Rp63,60 triliun) diikuti dengan skema KUR Kecil (Rp35,88 triliun) dan KUR TKI (Rp406 miliar). Penyaluran KUR terpusat di wilayah Jawa mencapai Rp55 triliun atau 55% dari total realisasi KUR 2018. Di

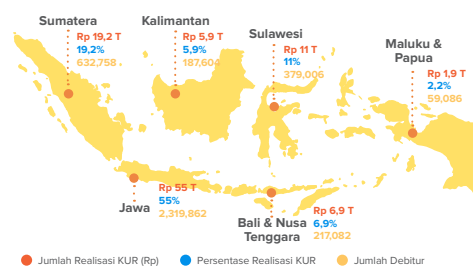
luar wilayah Jawa, penyaluran KUR terbesar ada di Sumatera (Rp19,2 triliun) dan Sulawesi (Rp11 triliun).

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (55,8%), sedangkan sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa) mencapai 44,2% dari total penyaluran KUR per September 2018.

Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi



Penyaluran KUR Wilayah



No	Penyalur	KUR Mikro			KUR Kecil			KUR Penempatan TKI			Total		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target (Rp T)	Realisasi (Rp T)	%
1	PT. BRI (Persero)	68.880.000	60.576.206	87.94%	10.640.000	8.229.451	77.34%	224.000	151.585	67.67%	79.744	68.957	86.47%
2	PT. Bank Mandiri (Persero)	2.100.000	1.588.703	75.65%	15.444.000	11.852.280	76.74%	16.000	13.625	85.16%	17.560	13.455	76.62%
3	PT. BNI (Persero)	3.360.000	450.226	13.40%	12.856.000	12.301.108	95.68%	224.000	111.915	49.96%	16.440	12.863	78.24%
4	PT. BTN (Persero)	6.000	338	5.63%	270.000	68.409	25.34%	-	-	0.00%	276.0	69	24.91%
5	Bank Umum Swasta	1.181.000	730.807	61.88%	1.094.000	342.388	31.30%	251.000	129.469	51.58%	2.526	1.203	47.61%
6	Bank Pembangunan Daerah	1.221.000	251.830	20.62%	5.419.000	3.093.877	57.09%	-	-	0.00%	6.640	3.346	50.39%
7	Perusahaan Pembiayaan	100.000	412	0.41%	-	-	0.00%	250.000	-	0.00%	350.0	0.4	0.12%
8	Koperasi Simpan Pinjam	85.000	-	0.00%	10.000	-	0.00%	-	-	0.00%	95.0	-	0.00%
TOTAL		76.933.000	63.598.522	82.67%	45.733.000	35.887.513	78.47%	965.000	406.594	42.13%	123.631	99.893	80.80%

*) Data per September 2018

• Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

Pembiayaan Ekonomi Kreatif



OJK melakukan penandatanganan MoU antara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) tentang Penjaminan Pembiayaan Berorientasi Ekspor dan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Tujuan MoU untuk mendorong kinerja dan percepatan pertumbuhan industri pembiayaan dan meningkatkan peran serta IKNB melalui akselerasi pembiayaan berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif. Selama triwulan III-2018, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp2,8 triliun**.

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD)



Forum untuk meningkatkan **percepatan akses keuangan** di daerah dalam rangka mendorong **pertumbuhan ekonomi daerah** serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

35 TPAKD
26 Provinsi 3 Kab/Kota



2016

45 TPAKD
28 Provinsi 20 Kab/Kota



2017

73 TPAKD
31 Provinsi 42 Kab/Kota



September 2018

Progran Unggulan TPAKD

TPAKD Prov Sumatera Bagian Utara

Penguatan swasembada dan ketahanan pangan Sumatera Utara

TPAKD Prov Kalimantan Selatan

Pengembangan Pariwisata Sungai melalui Perluasan Akses Keuangan

TPAKD Prov Sulawesi Selatan

Fasilitasi kredit/pembiayaan LJK epada UMKM sektor unggulan daerah di komoditas pertanian (arti luas termasuk perkebunan & maritim)

TPAKD Prov Jawa Timur

Percepatan akses keuangan pada Sektor Agrobisnis (Komoditi Salak, Jamur Kancing, Strawberry dan Umbi Porang)

TPAKD Prov Sumatera Bagian Selatan

Program Perluasan Akses Keuangan melalui Program SimPel dan Laku Pandai

TPAKD Prov Banten

Program ketahanan pangan untuk komoditas pertanian dan perikanan. (Pilot project program ketahanan pangan di Kab. Lebak Banten dan Pandeglang)

TPAKD Prov Jawa Barat

Perluasan akses keuangan bagi petani hortikultura di Pengalengan, Kabupaten Bandung, mnelalui Pemanfaatan produk asuransi mikro dan pembiayaan KUR Pertanian serta Agen Laku Pandai

TPAKD Prov Jawa Tengah

Fasilitasi Pembiayaan LJK ke sektor UMKM, diantaranya melalui pengembangan skim pembiayaan mikro "Mitra 25 Bank Jateng"

TPAKD Prov Bali

Akselerasi dan dukungan pencapaian program pengembangan 100 Desa Wisata

◦ Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center



Skema BUM-des Center yang difasilitasi oleh OJK tersebut dikembangkan dengan fokus pada penguatan 3 (tiga) pilar utama yaitu:

1. Pilar kelembagaan dan bisnis, BUMDes yang telah memiliki legalitas badan hukum didorong untuk mendirikan unit usaha berbasis potensi desa melalui fasilitasi *business matching* agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa.
2. Pilar akses keuangan, optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui ketersediaan akses keuangan di BUMDes.
3. Pilar digitalisasi, selain berperan sebagai *off-taker* terhadap hasil produksi masyarakat desa, BUMDes juga memfasilitasi masyarakat desa untuk mengakses pasar melalui *platform market place* yang dikembangkan melalui ekosistem BUMDes yaitu BUMdesa Online.

Selama 2018, telah diresmikan **3 BUM-des Center** di Desa Wonorejo, Desa Traktakan Kabupaten Bonodowoso , dan Desa Tunjungtirta Kabupaten Malang



Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

Green Bonds & Obligasi Daerah



Green Bonds

OJK menerbitkan peraturan mengenai Efek Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bonds*). Penerbitan peraturan tersebut merupakan implementasi pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Penerbitan peraturan tersebut diharapkan menjadi alternatif pembiayaan di Pasar Modal.



Pengembangan Obligasi dan Sukuk Daerah

1. Model pembiayaan melalui penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan alternatif instrumen pendanaan non APBD dari Pasar Modal.
2. Kontribusi OJK dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah melalui penerbitan:
 - a. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah,
 - b. Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan
 - c. Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
3. Peluncuran Tim Percepatan Penerbitan Obligasi Daerah dan Layanan Informasi Penerbitan Obligasi Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

• Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)



Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.

Roadmap Laku Pandai



29
bank partner



22.040.556
nasabah



34
provinsi



804.308
agen



Rp1,49 triliun
Dana Pihak Ketiga



512
kabupaten/
kota

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal



**Efek Beragun Aset – Surat
Partisipasi (EBA SP)**

5
Jumlah
EBA-SP

Rp3,57 triliun
Total Nilai
Sekuritisasi



**Penawaran Umum Sektor
Infrastruktur**

22
Emiten

Rp28,05 triliun
Total Nilai Emisi

24
Penawaran
Umum



KIK-EBA

Rp7,44 triliun
Total Nilai
Sekuritisasi



KIK-DIRE

Rp0,62 triliun
Total Nilai
Sekuritisasi

◦ Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Kontributif

SIMPEL (Simpanan Pelajar)



“SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.”

Capaian Kinerja Program Simpanan Pelajar



293
bank



322.039
sekolah



16.280.353
rekening



Rp6,37 triliun
nominal

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia.



Pada 2018, OJK telah menggandeng tujuh Bank.



• Implementasi MPSJKI 2018

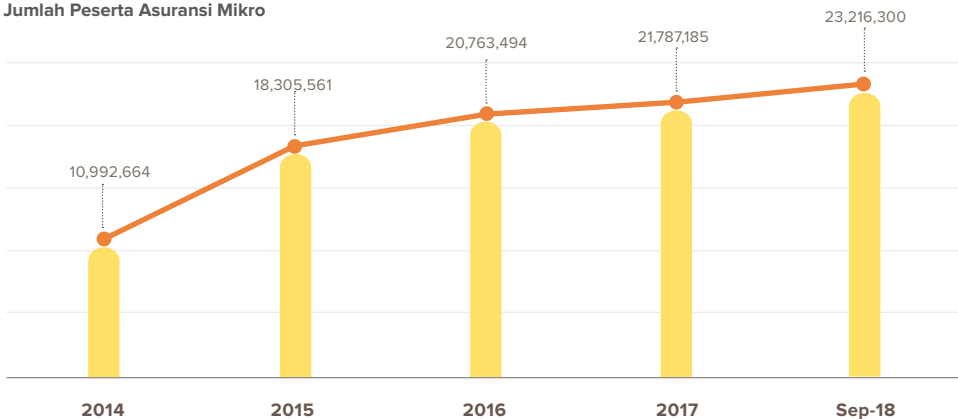
Pilar Kontributif

Asuransi Mikro



Untuk mewujudkan industri asuransi yang inklusif, OJK memiliki misi untuk mengembangkan asuransi yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau dikenal sebagai asuransi mikro.

Jumlah Peserta Asuransi Mikro



Reksa Dana Syariahku (SAKU)



Program investasi syariah untuk pelajar dan mahasiswa yang bersifat massal, berupa produk reksa dana syariah dengan persyaratan yang mudah dan sederhana.

Reksa Dana Mini Mart

Penjualan reksa dana dengan mudah melalui jaringan minimarket. Program ini diterbitkan untuk menambah alternatif pilihan pembayaran reksa dana. Selain melalui transfer bank, pembayaran reksa dana juga bisa dilakukan secara tunai, atau *e-money*, atau kartu debit di seluruh jaringan minimarket terdekat.

• Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Inklusif

Expo IB Vaganza



Kegiatan rutin dalam rangka peningkatan *outreach* nasabah baru perbankan syariah. Selama 2018, Telah dilaksanakan IB Vaganza ke **5 Kota** dan berhasil melakukan pembukaan rekening sejumlah **25.085 rekening** dengan total ***outstanding* Rp958 miliar**.

No	IB Vaganza	Jumlah Rekening	Nominal
1	<i>iB Vaganza</i> Malang	4.404 rekening	Rp157 miliar
2	<i>iB Vaganza</i> Bandung	4.798 rekening	Rp203 miliar
3	<i>iB Vaganza</i> Pekanbaru	3.254 rekening	Rp25 miliar
4	<i>iB Vaganza</i> Mataram	8.390 rekening	Rp61 miliar
5	<i>iB Vaganza</i> Jakarta	4.239 rekening	Rp512 miliar
JUMLAH		25.085 rekening	Rp958 miliar

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018



Dalam rangka mendorong perkembangan riset keuangan syariah khususnya dikalangan civitas akademika, OJK bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) telah menyelenggarakan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018 yang bertempat di Banda Aceh, Aceh dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) sebagai *host university*.

◦ Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Inklusif

Galeri Investasi *Mobile*

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan program yang dinamakan Galeri Investasi *Mobile* (GIM). GIM dimaksud untuk menanamkan pentingnya merencanakan keuangan, mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa di sektor Pasar Modal, membuka akses keuangan masyarakat atas sektor dimaksud, serta menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk investasi.

Manfaat bagi Para Pihak

- Bagi OJK & BEI, sebagai sarana sosialisasi & edukasi di kalangan akademis agar dapat terlaksana dengan baik, sehingga diharapkan civitas akademika tidak hanya mengenal Pasar Modal dari sisi teori saja akan tetapi dapat langsung melakukan prakteknya.
- Bagi Perguruan tinggi, ada aliansi strategis dengan para pelaku Pasar Modal (BEI, AB, Data Vendor). Meningkatkan *Brand Name* dan Nilai Jual perguruan tinggi.
- Bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa, sebagai langkah media promosi dikalangan mahasiswa/akademisi dan sebagai media recruitment SDM Pasar Modal yang handal.



Peluncuran GIM di Universitas Tadulako Palu dan
Universitas Khairun Ternate

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Inklusif

SLIK (SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN)



Pelaporan dilakukan secara terpusat

- Tidak perlu menyediakan SDM di setiap kantor cabang
- Kemudahan pelapor dalam melakukan kontrol terhadap kualitas data
- Kemudahan OJK dalam melakukan *monitoring* pelaporan
- Kemudahan OJK dalam memberikan layanan bantuan/*helpdesk*

Cakupan data lebih lengkap

- Cakupan Pelapor lebih luas, yaitu seluruh LJK.
- Terdapat tambahan data, antara lain penghasilan debitur, data pasangan debitur, informasi kredit program pemerintah.



Jaringan komunikasi data dapat menggunakan internet dan ektranet sehingga biaya lebih murah

Validasi laporan dan permintaan Informasi Debitur lebih cepat Menerapkan *Single Identity* (CIF)

Informasi pada SLIK merupakan kontribusi 1.655 lembaga jasa keuangan yang terdiri dari 102 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.337 BPR dan 142 BPRS 32 Lembaga Pembiayaan, lima Perusahaan Modal Ventura, delapan Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan satu Koperasi Simpan Pinjam. Informasi tersebut yang diberikan melalui platform informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi iDeb Viewer.



Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Inklusif

Inovasi Keuangan Digital & OJK *Infinity*

Financial Technology

Peningkatan dan perluasan kapasitas pembiayaan kepada masyarakat untuk mewujudkan inklusi keuangan melalui digitalisasi teknologi finansial dan regulasi terkait *peer-to-peer* lending.

 **75**
perusahaan

 **Rp15,99 triliun**
total pembiayaan

 **1,20%**
NPL

 **2,80 juta**
debitur

 **182 ribu**
kreditur

*Data Per Desember 2018



OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK Infinity)

OJK Infinity merupakan wadah diskusi serta kolaborasi antara industri, regulator, pemerintah, akademisi dan *innovation hub* lain yang berfungsi untuk:

1. *Regulatory sandbox*
2. Sebagai *innovation hub* untuk pengembangan Industri Keuangan Digital (IKD)
3. Sebagai sentra edukasi

Penerbitan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini berisi Pokok Aturan Inovasi Keuangan Digital dan Payung Hukum Pengembangan Fintech



Mekanisme
Pencatatan &
Pendaftaran *Fintech*



Mekanisme
Pemantauan
& Pengawasan *Fintech*



Pembentukan
Ekosistem *Fintech*



Membangun
Budaya Inovasi



Inklusi & Literasi



Bisnis &
Perlindungan Data



Manajemen Risiko
yang Efektif



Perlindungan
Konsumen

Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Inklusif

Perkembangan *Financial Technology*



Implementasi MPSJKI 2018

Pilar Inklusif

Modul *E-Learning*



Online Modul *E-learning* tingkat SD dan SMP

Tujuan dari penyusunan modul *E-Learning* ini adalah untuk menarik minat pelajar dan pengguna *E-Learning* secara umum mempelajari bidang keuangan melalui pembelajaran yang interaktif dan inovatif, antara lain dalam bentuk animasi dan permainan.

Pengembangan modul *E-Learning* ini merupakan kerja sama OJK dengan Asian Development Bank (ADB) yang telah dimulai sejak tahun 2017. ADB mendukung penuh upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan OJK terhadap masyarakat, khususnya bagi kaum muda dan pelajar, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan modul *E-Learning* ini.



Dapat diakses melalui
www.sikapiuangmu.ojk.go.id

- Implementasi MPSJKI 2018 Pilar Inklusif

Re-branding Contact Center OJK 157



OJK memiliki Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang memiliki fasilitas *trackable* dan *traceable* dan layanan tersebut tersedia di 35 KR/KOJK yang sudah memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015. Revitalisasi Layanan Konsumen OJK 1500655 menjadi Kontak OJK 157.



Jenis Layanan	Total Layanan Akumulatif	Total Layanan Akumulatif (%)	Selesai
Pertanyaan	149.903	81,67%	98,46%
Informasi	29.639	16,15%	97,54%
Pengaduan	4.004	2,18%	99,80%
Total	183.546	-	98,34%

*Data 12 Desember 2018

(1) Platinum
The Best Business Contribution (Korporat)

(2) Gold
The Best Agent Inbound (Individu)
The Best Reliable Team (Team Work)

(3) Silver
The Best Agent English (Individu)
The Best Employee Engagement (Korporat)
The Best People Development (Korporat)

(4) Bronze
The Best Technology Innovation (Korporat)
The Best Social Media (Korporat)

- Implementasi MPSJKI 2018 Pilar Inklusif

Penguatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)



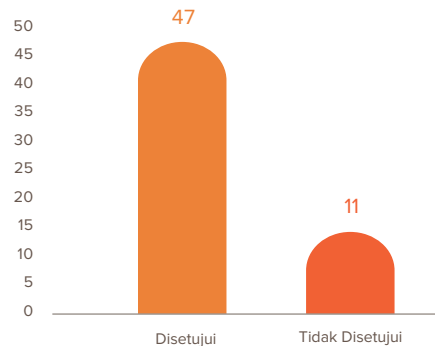
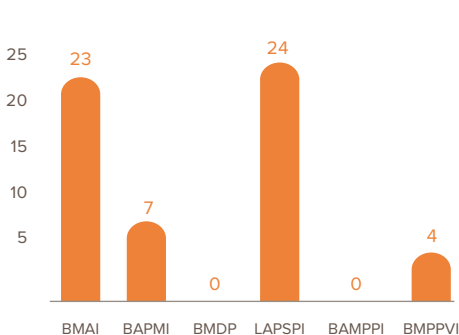
Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang merupakan lembaga yang membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa Produk Jasa Keuangan. Terdiri atas 6 LAPS yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPIV).

Roadmap “Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018-2022)”

Misi *Roadmap* “Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018-2022)” adalah terselenggaranya layanan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan Indonesia yang kredibel. Ada dua visi yang hendak dicapai untuk mewujudkan misi tersebut. Visi pertama mewujudkan LAPS di sektor jasa keuangan yang aksesibel, independen, adil, efektif dan efisien, yang dipercaya oleh masyarakat, konsumen, dan pelaku usaha jasa keuangan. Visi Kedua terbentuknya LAPS yang terintegrasi di sektor jasa keuangan.



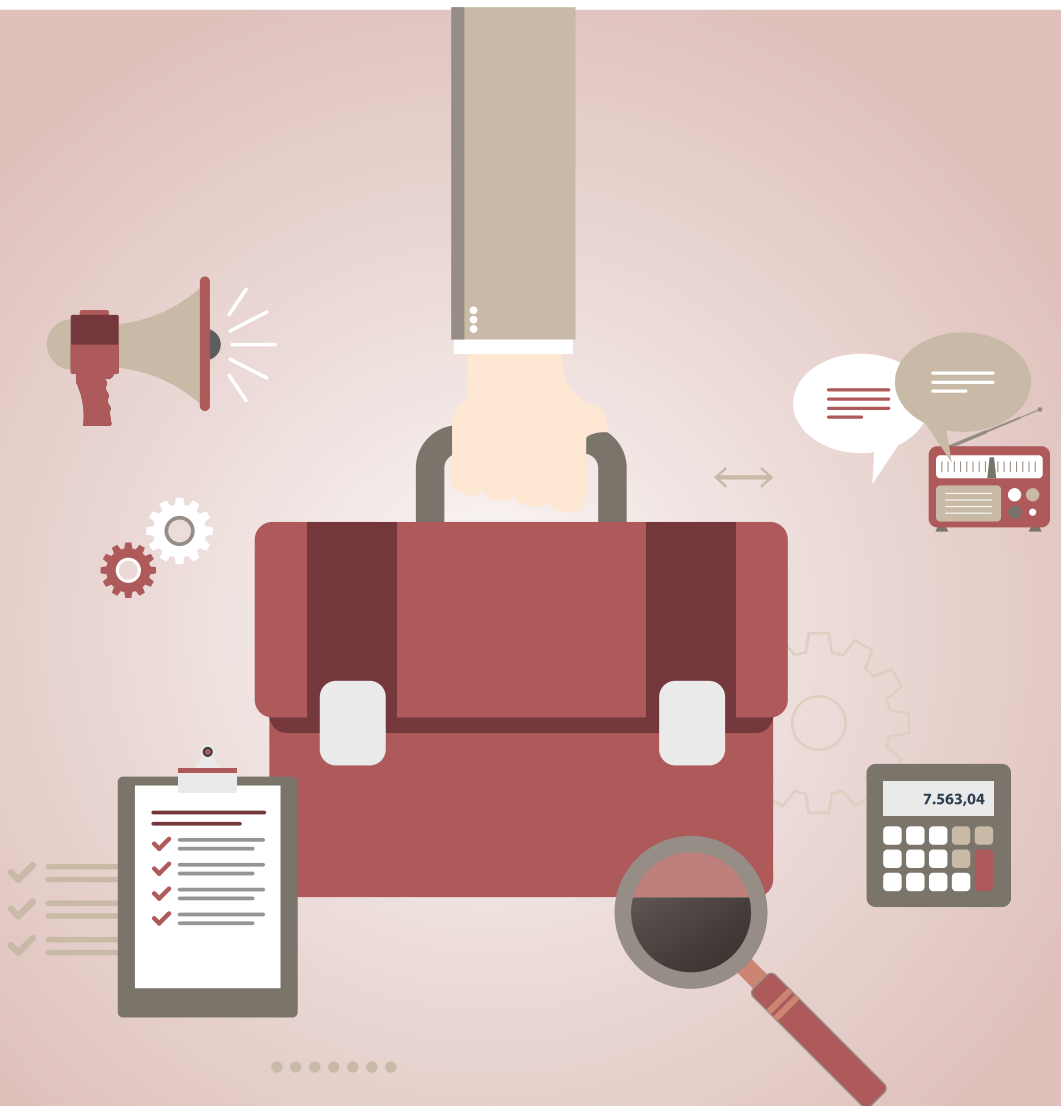
Layanan Melalui LAPS 2018



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

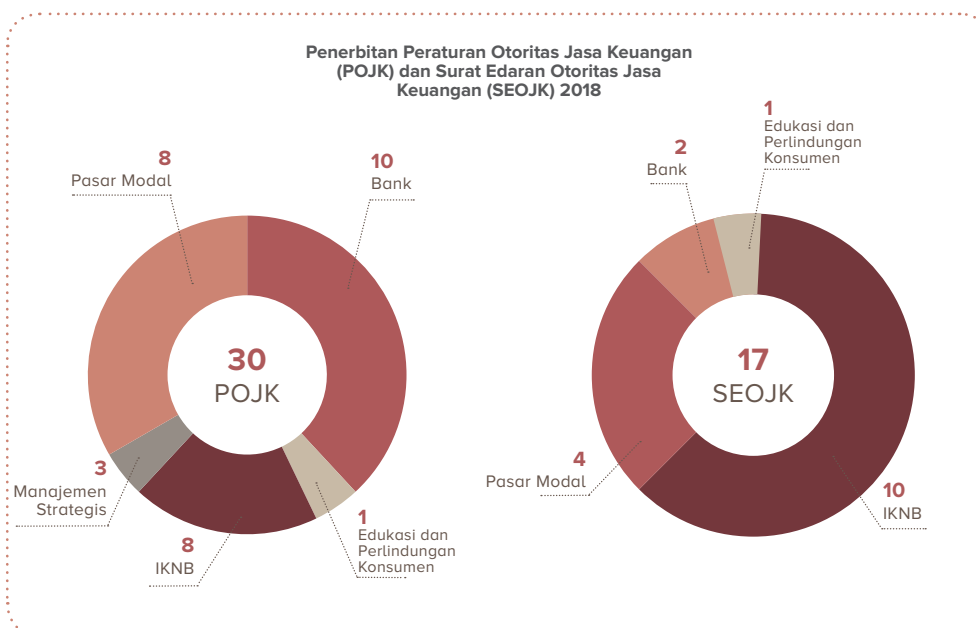
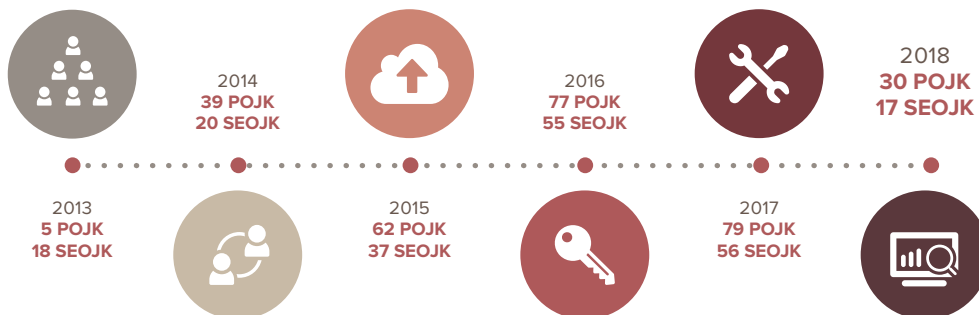
Bab 4

Pelaksanaan Tugas Pokok & Fungsi OJK



• **Pengaturan** Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang Januari – 19 Desember 2018, OJK telah menerbitkan 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).



• **Pengaturan** Sektor Jasa Keuangan

Sektor Perbankan

POJK	Perihal	Bidang
2/POJK.03/2018	Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i>	Perbankan
6/POJK.03/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum	Perbankan
12/POJK.03/2018	Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum	Perbankan
14/POJK.03/2018	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa	Perbankan
15/POJK.03/2018	Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa	Perbankan
16/POJK.03/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah	Perbankan
17/POJK.03/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank	Perbankan
19/POJK.03/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Perbankan
23/POJK.03/2018	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Perbankan
24/POJK.03/2018	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Perbankan

Sektor Pasar Modal

POJK	Perihal	Bidang
3/POJK.04/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk	Pasar Modal
7/POJK.04/2018	Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik	Pasar Modal
9/POJK.04/2018	Pengambilalihan Perusahaan Terbuka	Pasar Modal
10/POJK.04/2018	Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi	Pasar Modal
11/POJK.04/2018	Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional	Pasar Modal
20/POJK.04/2018	Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek	Pasar Modal
21/POJK.04/2018	Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa	Pasar Modal
25/POJK.04/2018	Lembaga Pendanaan Efek	Pasar Modal

- Pengaturan** **Sektor Jasa Keuangan**

Sektor IKNB

POJK	Perihal	Bidang
1/POJK.05/2018	Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama	IKNB
4/POJK.05/2018	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	IKNB
5/POJK.05/2018	Laporan Berkala Dana Pensiun	IKNB
8/POJK.05/2018	Pendanaan Dana Pensiun	IKNB
27/POJK.05/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	IKNB
28/POJK.05/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah	IKNB
29/POJK.05/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun	IKNB
30/POJK.05/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin	IKNB

Sektor Manajemen Bisnis

POJK	Perihal	Bidang
13/POJK.02/2018	Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan	Manajemen Strategis
:22/ POJK.02/2018	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Manajemen Strategis
26/POJK.02/2018	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan	Manajemen Strategis

Sektor Edukasi dan Perlindungan Konsumen

POJK	Perihal	Bidang
18/POJK.07/2018	Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	EPK

• Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK memberikan perhatian penguatan *surveillance* dan Protokol Manajemen Krisis, serta penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.



Tindak Lanjut Pasca-Penetapan UU PPKSK

- OJK menetapkan daftar bank sistemik setiap enam bulan sekali, dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
- Pada September 2018, OJK telah menetapkan Daftar Bank Sistemik.

Simulasi Protokol Manajemen Krisis

- KSSK telah menyelenggarakan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis 2018 secara *full dress* pada tanggal 8 November 2018. Simulasi ini dihadiri oleh seluruh anggota KSSK (Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisiner LPS).
- Tujuan simulasi adalah untuk menguji ketentuan UU PPKSK serta penanganan solvabilitas Bank Sistemik sebelum terjadinya krisis sistem keuangan.



Sekretariat KSSK dan Penguatan Protokol Manajemen Krisis

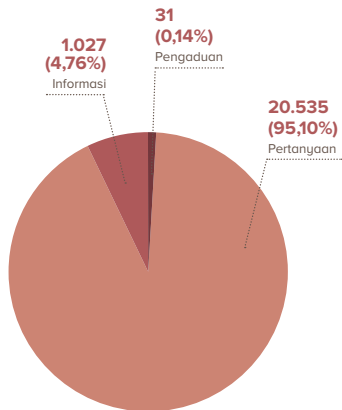
- Pada tahun 2018, KSSK telah mengoperasikan Sekretariat KSSK guna mendukung tugas dan wewenang KSSK. Sekretariat KSSK ini terdiri atas perwakilan pegawai dari OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS.
- Kegiatan pemantauan (*surveillance*) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan kerentanan di sektor jasa keuangan. Indikator-indikator pemantauan sektor jasa keuangan juga terus disempurnakan secara berkesinambungan.



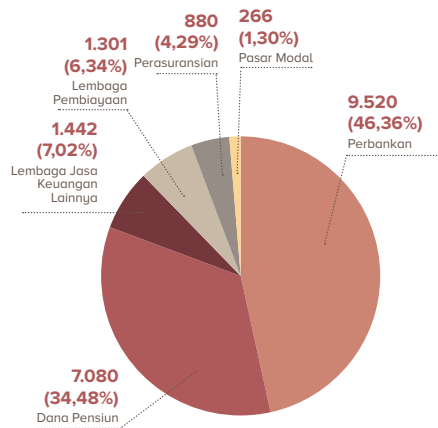
• Pelaksanaan Fungsi Edukasi & Perlindungan Konsumen

- Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang memiliki fasilitas *trackable* dan *traceable*
- Sertifikasi ISO 9001:2015 terhadap Layanan Konsumen OJK

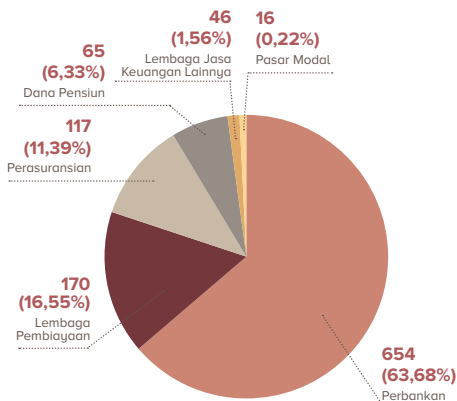
Layanan Masuk



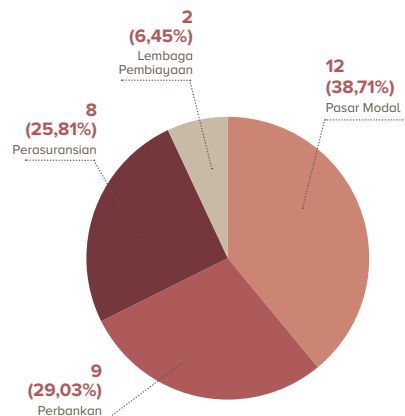
Layanan Informasi



Layanan Pertanyaan



Layanan Pengaduan



Secara umum, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 96,9% (19.907 layanan) dan layanan pengaduan selesai 96,8% (30 pengaduan).

• Pelaksanaan Fungsi Edukasi & Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Pengawasan *Market Conduct*



Pengawasan *Market Conduct* bertujuan untuk mengawasi pola perilaku dan interaksi antara PUJK dan konsumen agar mengurangi potensi kerugian masyarakat atas produk/layanan yang ditawarkan pelaku usaha jasa keuangan melalui penilaian mandiri (*Self Assesment*), pemantauan tematik (*Thematic Surveillance*), dan pemantauan iklan.



Pengawasan Tematik

Pemeriksaan tematik market conduct dilakukan melalui **review konten dan format perjanjian baku** untuk memastikan kepatuhan perjanjian baku yang dibuat Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) agar seimbang, adil, dan wajar serta tidak mengandung unsur eksponerasi dan penyalahgunaan keadaan.



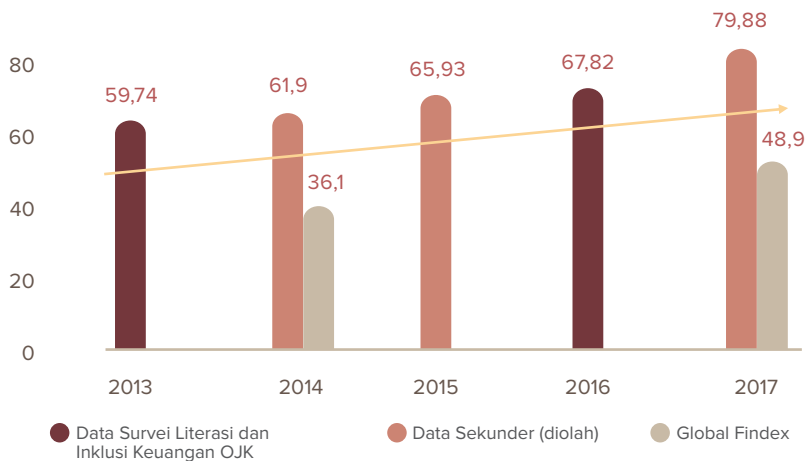
Pemantauan Iklan

Pemantauan iklan dan penawaran produk dan layanan sektor jasa keuangan dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI). Monitoring yang dilakukan mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

• **Pelaksanaan Fungsi** Edukasi & Perlindungan Konsumen

Peningkatan Indeks Literasi dan Indeks Inklusi Keuangan melalui Edukasi dan Sosialisasi

Indeks Inklusi Keuangan



Sosialisasi dan Media Campaign



• **Pelaksanaan Fungsi** Edukasi & Perlindungan Konsumen

Edukasi Keuangan Tahun 2018

Capaian

Jumlah peserta

 **23.515**
orang

Jumlah edukasi

 **96**
kegiatan

Peningkatan pemahaman peserta

 **12,29%**
Data Per Desember 2018

Bentuk Kegiatan

- Edukasi Komunitas
- ToT Penyuluh
- ToT Guru
- ToT Dosen
- Pagelaran Wayang
- Edukasi Waspada Investasi
- Safari Ramadhan
- Outreach Program
- SimPel Goes to School
- Edukasi d/r Bantuan Sosial non Tunai
- Galeri Investasi Mobile
- OJK Goes to Campus



Materi Ajar

- **Pengelolaan keuangan**
- **Waspada berinvestasi**
- **Pengenalan produk/layanan jasa keuangan :**
 - Fitur produk
 - Manfaat dan risiko
 - Hak dan kewajiban
 - Cara mengakses/memperoleh produk
 - Biaya-biaya yang timbul atas perolehan produk
- Cara untuk melakukan pencairan produk, penebusan, klaim, atau pelunasan produk
- Informasi mekanisme transaksi
- Perpajakan terkait produk/jasa keuangan.

Segmen Komunitas



New Targets



● Pelaksanaan Fungsi Edukasi & Perlindungan Konsumen

Bulan Inklusi Keuangan



Bulan Inklusi Keuangan (BIK) adalah kegiatan inklusi keuangan yang diinisiasi oleh OJK dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan *stakeholders* terkait secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. *Tagline* dalam kegiatan BIK adalah “Inklusi Keuangan Untuk Semua” dengan maksud untuk mencapai peningkatan inklusi keuangan yang signifikan untuk seluruh kalangan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan Oktober dan pada tahun 2018 merupakan pelaksanaan BIK untuk kali ketiganya.

Sebagai puncak kegiatan BIK tahun 2018 diselenggarakan kegiatan FinEXPO & Sundown Run 2018 yang merupakan inisiasi dari PUJK dan didukung oleh OJK. Kegiatan tersebut

dilaksanakan di Jakarta, dengan tema “Sinergi Aksi Dalam Mendorong Akses Keuangan dan Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Kredibel” dan *tagline* yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah “Semua Inklusi, Perlindungan Pasti”. Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut adalah sebanyak 10.000 orang yang terdiri dari 7.000 orang yang berasal dari calon nasabah/nasabah *existing*, dan keluarga nasabah PUJK serta 3.000 orang peserta *Sundown Run*.



189
Kota



557
Lembaga Jasa
Keuangan

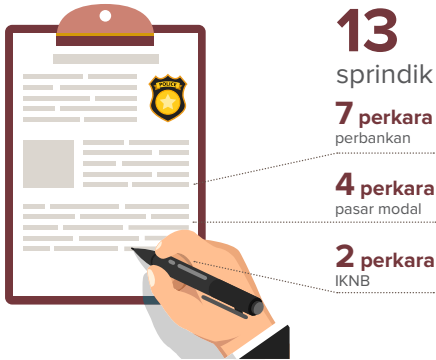


2.223
Kegiatan



7.511.700
Rekening

• Pelaksanaan Fungsi Penyidikan & Satgas Waspada Investasi



- 13 perkara telah diserahkan kepada Jaksa Peneliti
- 15 berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21)
- 5 perkara mendapat putusan hukum tetap (inkracht)



Tahun 2018, Penguatan Satgas Waspada Investasi dengan perluasan keanggotaan dari 7 Kementerian/Lembaga menjadi 13 Kementerian/Lembaga.

Satgas Waspada Investasi bertugas melakukan pengawasan berupa deteksi dini terhadap Entitas yang melakukan kegiatan investasi yang diduga telah merugikan masyarakat.

Sampai Desember 2018 Satgas Waspada Investasi telah melakukan penghentian kegiatan operasional terhadap 108 Entitas yang terindikasi penyimpangan izin yang diberikan instansi terkait. Selanjutnya terdapat 11 Entitas yang telah diproses hukum.

Data Kasus Investasi Ilegal di Indonesia



Contoh beberapa kasus investasi bodong (2016 - 2017) dan dana yang berhasil dikumpulkan

First Travel

Rp 800
miliar

PT Cakrabuana
Sukses Indonesia

Rp 1,6
triliun

Dream for
Freedom

Rp 3,5
triliun

Pandawa Group

Rp 3,8
triliun

OJK mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi melalui telepon 157, email waspadainvestasi@ojk.go.id atau konsumen@ojk.go.id, apabila mendapatkan penawaran investasi yang tidak wajar.

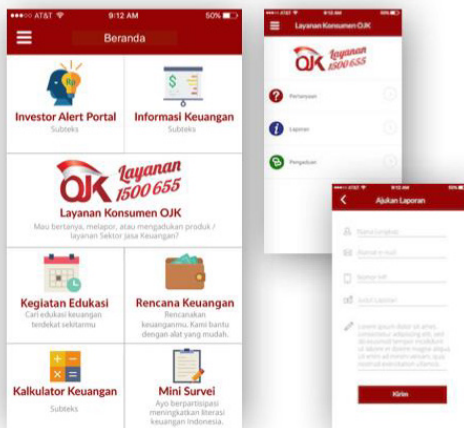
• Pelaksanaan Fungsi Penyidikan

INVESTOR ALERT PORTAL (IAP)

Pengembangan sistem IAP bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat terkait legalitas entitas yang menawarkan investasi dengan skema tertentu.

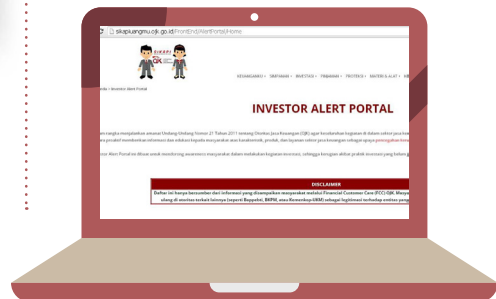
193
Entitas
terdaftar dalam IAP

2 akses :



mobile apps Sikapiuangmu

minisite Sikapiuangmu



OJK mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi melalui telepon 157, email waspadainvestasi@ojk.go.id atau konsumen@ojk.go.id, apabila mendapatkan penawaran investasi yang tidak wajar.

• Pelaksanaan Fungsi

Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)



Pada 2018, APG telah menetapkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah

masal dinilai sangat memadai. Selanjutnya, OJK melakukan pemenuhan terhadap priority action plan untuk persiapan MER oleh FATF tahun 2019.

Mutual Evaluation Review (MER)

Mutual Evaluation Review (MER) adalah serangkaian kegiatan suatu badan International (FATF) yang dilaksanakan melalui salah satu organisasi regionalnya (APG) Sekretariat untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT).

• Pelaksanaan Fungsi

Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Pengembangan Sistem informasi program APU dan PPT (SIGAP)



SIGAP adalah sistem informasi berbasis web yang dibangun dalam rangka mengintegrasikan data dan informasi hasil pelaksanaan pengawasan program APU PPT. SIGAP sangat mendukung pelaksanaan monitoring dan rekomendasi langkah perbaikan terkait dengan penerapan program APU PPT pada penyedia jasa keuangan (PJK) yang diawasinya. Di samping itu, sistem informasi tersebut juga menyediakan data pendukung untuk pelaksanaan pengawasan program APU PPT sehingga pelaksanaan pengawasannya menjadi lebih efektif dan optimal.

Pemeriksaan Program APU PPT

Pemeriksaan program APU PPT dilakukan terhadap dua spek yaitu pemeriksaan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan. Laporan ini menggambarkan hasil pengawasan program APU PPT secara historis untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB yang mencakup juga data statistik terkait hasil pengawasan program APU PPT terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan (TKM, TKT, dan TKL), hasil analisis sekaligus rekomendasi dalam rangka penguatan pengawasan APU PPT pada sektor jasa keuangan.

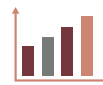


478
Bank



17
Perusahaan
Asuransi

3
Dana
Pensiun



9
Manajer
Investasi

35
Perusahaan
Pembiayaan

3
Asuransi
Syariah

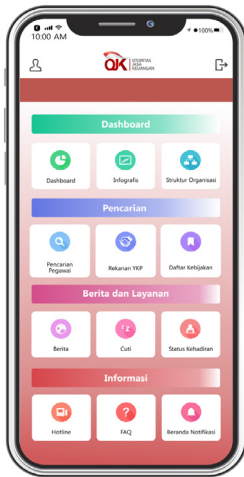
Halaman ini Sengaja Dikosongkan

Bab 5

Program Strategis OJK untuk **Peningkatan Kapasitas Organisasi**



• Pengembangan Kapasitas Organisasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia



Fungsi Layanan SMART HR

- Dashboard data SDM dan Organisasi
- Infografis
- Struktur Organisasi
- Pencarian Data
- Daftar Rekanan YKP
- Daftar Kebijakan
- Berita
- Pengajuan Cuti
- Status Kehadiran
- Daftar Hotline
- Notifikasi dan Running Text
- Profil Individu

Digital Assistant atau DILAN adalah Asisten *online* yang ada di SIMFOSIA untuk membantu menyediakan informasi dan data berdasarkan kata kunci (*keyword*) sesuai dengan kebutuhan Pegawai.



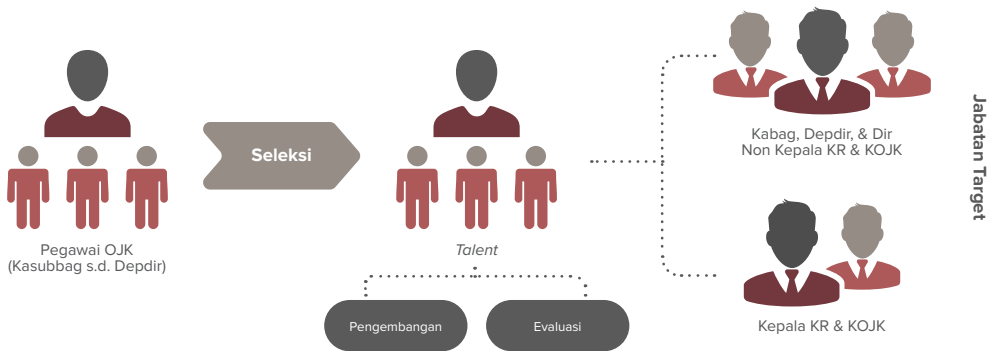
• Pengembangan Kapasitas Organisasi

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kapasitas Organisasi dan SDM: *Talent Pool* Jenjang Karir

Talent Pool adalah Sekelompok Pegawai yang memenuhi kriteria tertentu, yang dipersiapkan sebagai kandidat untuk mengisi jabatan tertentu yang lebih tinggi (suksesi).

Konsep Talent Pool



Proses Seleksi *Talent Pool*



• Pengembangan Kapasitas Organisasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Peserta Pengembangan Sumber Daya Manusia OJK



Program
Pengembangan
Kepemimpinan

397
pegawai



Program
Pengembangan
Kompetensi

5.351
pegawai



Program
Pendidikan
Formal

55
pegawai



Program
Pengenalan
Calon Pegawai

89
pegawai



Program
Purna Bakti

81
pegawai



Program
Assessment

207
pegawai



Program
Penugasan

45
pegawai

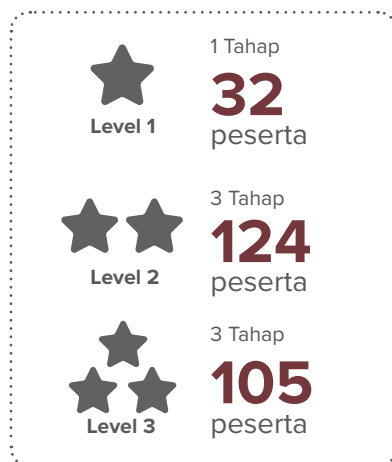
o Pengembangan Kapasitas Organisasi Sertifikasi Pengawas dan Pendidikan Formal

Program Sertifikasi Pengawas SJK

Program ini dilaksanakan untuk menjaga standarisasi Pengawas OJK yang dibentuk dari 3 kompartemen pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang berbeda.

Program ini bertujuan :

1. Memberikan standar profesionalisme Pengawas OJK
2. Memberikan mutual benefit bagi organisasi dan SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan SJK.



Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan program pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan mengembangkan kompetensi pegawai melalui peningkatan basis pengetahuan akademis sesuai kebutuhan OJK.

Jenis SKIM	Penjelasan SKIM	On Study	Lulus
SKIM 1	Program Pendidikan Formal dengan beasiswa OJK secara penuh	9	11
SKIM 1	Program Pendidikan Formal dengan Beasiswa dari Pihak Lain, OJK memberikan selisih antara jumlah yang diberikan oleh pihak lain dengan beasiswa OJK	8	8
SKIM 1	Program Pendidikan Formal dengan beasiswa dari pihak lain secara penuh	6	1
SKIM 1	Program Pendidikan Formal atas inisiatif sendiri dengan Beasiswa penggantian biaya pendidikan formal (penggantian) dari OJK	7	5
Total		31	24

• Pengembangan Kapasitas Organisasi

Recycling Program dan Standar Kompetensi

Topik Program *Recycling*

- *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis Risiko
- *Workshop* Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) Pasar Modal
- *Workshop Infrastructure Investment: Valuation and Financing*
- *Workshop* Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
- *Workshop* Pendalaman Aspek Syariah untuk Kepala dan Pelaksana Unit Pengelolaan Investasi Syariah
- *Capacity Building* Manajemen Risiko BPR : *Workshop* tentang Tata Cara Penilaian Profil Risiko
- Peningkatan Pemahaman Syariah Dan Metode Analisis Akad Syariah
- *Workshop Financial Technology, Treasury, Liquidity Gap Strategy, IT, Sales dan Fraud*
- *Workshop* Peningkatan Kompetensi Direktur dan Komisaris Bank perkreditan Rakyat
- *Workshop* Peningkatan Pemahaman Syariah dan Metode Analisis Akad Syariah
- Pelatihan/Asistensi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan
- *Workshop* Audit Syariah
- *Workshop* Implementasi PSAK 71
- *Workshop* Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
- *Workshop* Manajemen Risiko Dana Pensiun
- *Workshop* Pelatihan Penaksir Barang Jaminan Level 2
- *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pimpinan UUS Perusahaan Pembiayaan
- *Workshop* Implementasi Integrasi GRC di Indonesia
- Program Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Terkait Pengelolaan Keuangan Modul ALIKA



Total Peserta
Recycling

5420
 orang

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

Tahun	Judul RSKKNI	Bidang	Status		
			Prakonvensi	Konvensi	Penetapan KEMENAKER
2018	RSKKNI <i>Wealth Management</i>	Perbankan	-	-	✓
	RSKKNI <i>Tresuri</i>	Perbankan	-	✓	-
	RSKKNI <i>General Banking</i>	Perbankan	-	✓	-
	RSKKNI <i>Perasuransian</i>	IKNB	-	✓	-
	RSKKNI <i>Pembiayaan</i>	IKNB	-	✓	-
	RSKKNI <i>Pasar Modal</i>	Pasar Modal	✓	-	-

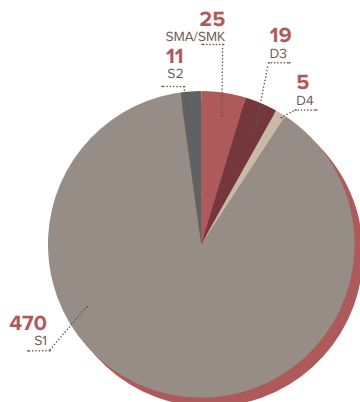
Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNi)

Tahun	Judul RKKNi	Bidang	Status		
			Penyusunan	Konvensi	Penetapan
2018	RKKNi <i>Wealth Management</i>	Perbankan	✓	-	-
	RKKNi <i>Audit Intern Bank</i>	Perbankan	✓	-	-
	RKKNi <i>Tresuri</i>	Perbankan	✓	-	-
	RKKNi <i>General Banking</i>	Perbankan	✓	-	-
	RKKNi <i>Perasuransian</i>	IKNB	✓	-	-
	RKKNi <i>Pembiayaan</i>	IKNB	✓	✓	-
	RKKNi <i>Pasar Modal</i>	Pasar Modal	✓	-	-

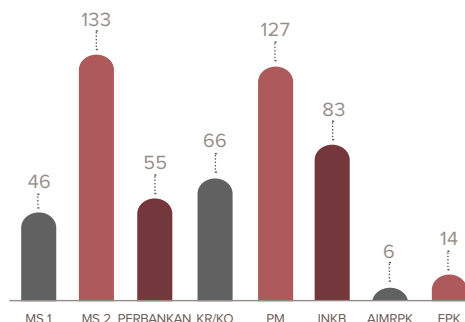
- Pengembangan Kapasitas Organisasi** **Pengembangan Kompetensi Masyarakat**

Program Praktik Kerja Lapangan

Jumlah Peserta PKL
Berdasarkan Jenjang Studi



Berdasarkan Penempatan



Penelitian

OJK memberikan kesempatan kepada para peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh Informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang komprehensif, dengan tetap berlandaskan asas keterbukaan dan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara.

Pendidikan	Jumlah
D3	2
S1	174
S2	46
S3	19
Dosen/Peneliti	13
Total	254

OJK Visit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima permohonan kunjungan bagi instansi pendidikan yang ingin memperdalam wawasan terkait tugas dan fungsi OJK.



Pengembangan Kapasitas Organisasi Jaringan Kantor OJK

34

Kantor OJK Regional / Kantor OJK telah menempati gedung sendiri.

1

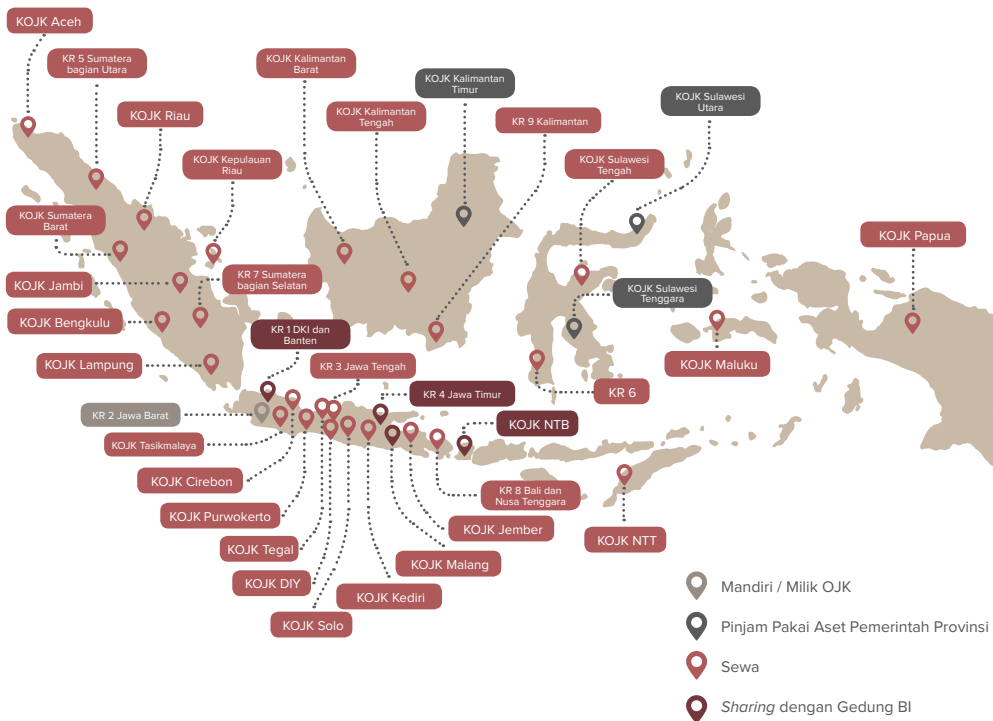
Kantor Regional / Kantor OJK mandiri milik sendiri

27

Sewa

3

pinjam pakai aset Pemerintah Provinsi.



◉ Pengembangan Kapasitas Organisasi Sistem Informasi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi



Untuk mendukung OJK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selama 2018 OJK telah mengembangkan infrastruktur pendukung baik aplikasi maupun pengembangan jaringan TI di Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK.

Aplikasi yang dikembangkan antara lain :

1. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)
2. Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)
3. Dashboard Konglomerasi Keuangan
4. Net Stable Funding Ratio
5. Minisite OJK Infinity – Financial Technology
6. Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) – Laporan KPMM dan ATMR Bank Umum
7. Dashboard Pendalaman Pasar Keuangan
8. S-INVEST
9. Mobile Sumber Daya Manusia (SMART HR)
10. Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)

Jumlah Aplikasi
hingga 2018

81
aplikasi



20
Perbankan



10
INKB



5
AIMRPK



15
Pasar
Modal



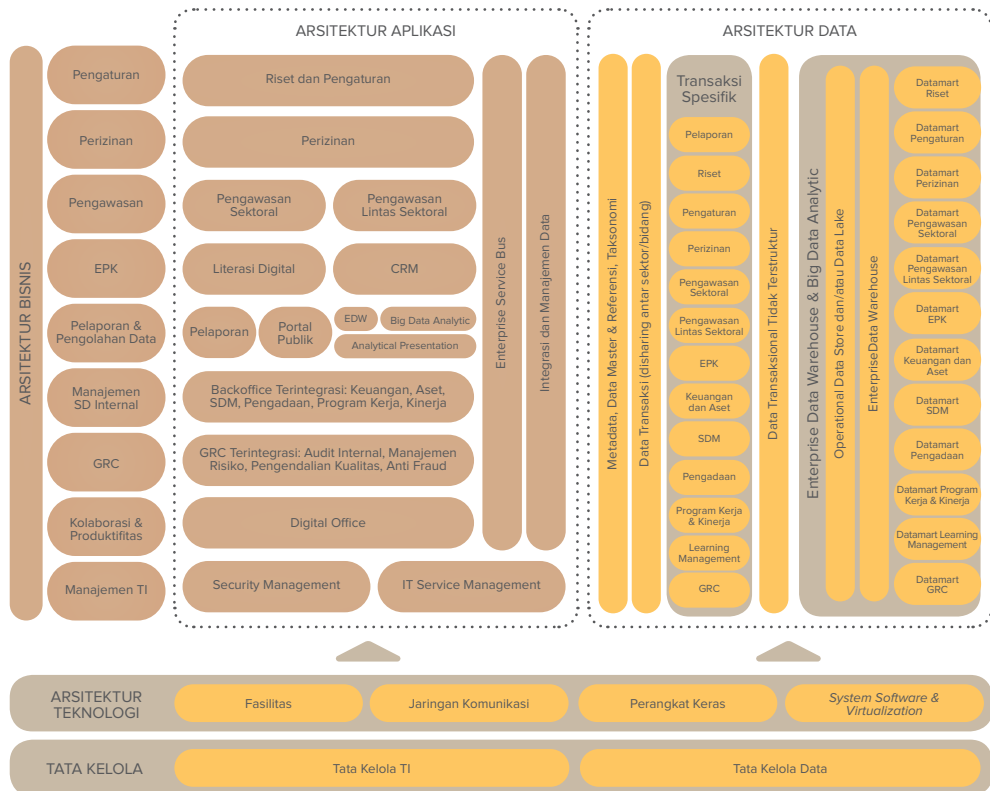
5
EPK



26
Manajemen
Strategis

• **Pengembangan Kapasitas Organisasi** Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022

Visi SI OJK: Mewujudkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, handal, aman dengan data berkualitas, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi OJK



● Pengembangan Kapasitas Organisasi

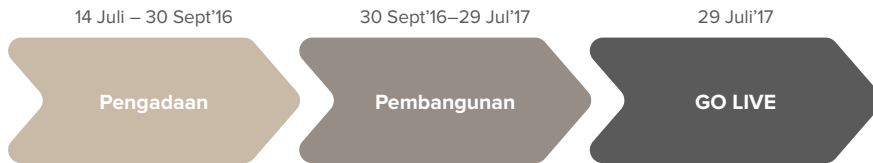
Pengembangan Pengelolaan Data SJK Terintegrasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan *pre-emptive*, kualitas pelayanan data/informasi kepada *stakeholder* dan efisiensi manajemen data, telah disusun Arsitektur Pengelolaan Data/Informasi SJK Terintegrasi sebagai masukan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022, dan *Roadmap* Pengembangan Pengelolaan Data/Informasi SJK Terintegrasi yang mulai diimplementasikan tahun 2019.

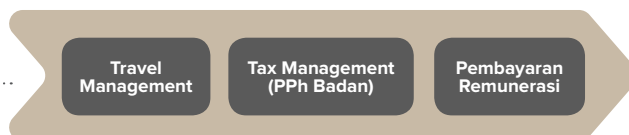
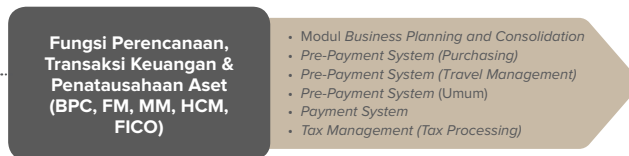
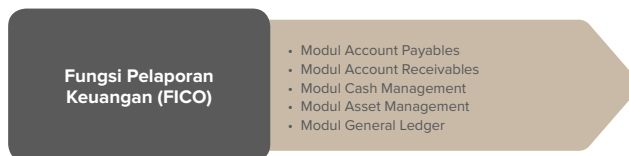


• Pengembangan Kapasitas Organisasi SI-AUTO

Pengembangan Sistem Pendukung Transformasi Keuangan OJK



Modul dan Fungsi



LAPORAN KEUANGAN OJK 2018

Z Programs

● Pengembangan Kapasitas Organisasi

Laporan Keuangan OJK 2017 Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan Keuangan OJK Tahun 2017 Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK



Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Audited OJK Tahun 2017 diserahkan pada tanggal 17 September 2018.

Penilaian WTP BPK yang kelima berturut-turut ini diharapkan lebih meningkatkan disiplin OJK dalam mengelola keuangan yang bersumber dari pungutan industri jasa keuangan. Sehingga kredibilitas dan integritas OJK menjadi aspek penting pencapaian kinerja OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan sektor jasa keuangan serta dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan dan perekonomian Indonesia.

● Pengembangan Kapasitas Organisasi

Penghargaan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan LHKPN Terbaik



OJK kembali meraih 2 (dua) penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) terbaik Tahun 2018. Penghargaan di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik merupakan yang ketiga kalinya diterima OJK, setelah juga diterima OJK pada tahun 2017 dan 2016. Penghargaan atas pengelolaan LHKPN Terbaik merupakan yang kedua kalinya setelah juga diterima OJK tahun 2017.



◉ Pengembangan Kapasitas Organisasi ISO 9001 : 2015

OJK Kembali Memperoleh Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu Atas Proses Bisnis Audit Internal, Manajemen Risiko, Whistle Blowing System, dan Program Pengendalian Gratifikasi



OJK khususnya Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) terus menjaga komitmen serta disiplin menjalankan proses bisnisnya berdasarkan sistem manajemen mutu melalui resertifikasi ISO 9001 atas proses bisnis audit internal, manajemen risiko, *whistle blowing system*, dan program pengendalian gratifikasi di Jakarta.

Sertifikasi ISO tersebut dilakukan dalam rangka mengevaluasi dan memonitoring proses bisnis yang ada di Bidang AIMRPK agar tetap terjaga kualitasnya.

• Pengembangan Kapasitas Organisasi

Penguatan *Governance* OJK 2018



Penguatan Integritas

- Survey Indeks Integritas
- Pengelolaan WBS
- Pelaporan dan Pengelolaan LHKPN
- Pengendalian Gratifikasi
- Kebijakan & Pelaksanaan Investigasi
- Penegakan Kode Etik

Penguatan Kualitas Eksekusi

- Inisiatif standarisasi asesmen risiko dalam setiap pengambilan keputusan
- Penerapan Standar Pengendalian Kualitas OJK dalam proses bisnis Satuan Kerja
- Forum GRC bersama asosiasi profesi dalam rangka memperkuat *governance*

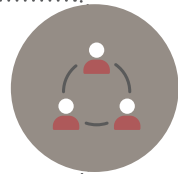


Penguatan *First Line*

- Pengelolaan Profil Risiko OJK dan Satuan Kerja
- Pelaksanaan *Control Self Assessment* (CSA)
- Pelaksanaan Audit di Kantor Pusat dan Seluruh KR/KOJK
- *Quick Risk* Reviu
- *Quick Quality* Reviu

Knowledge Management System OJK

- Tahapan awal penyusunan *Loss Event Database* (LED) dengan identifikasi hasil audit sebagai *risk event*



• Pengembangan Kapasitas Organisasi *Whistle Blowing System (WBS)*



OJK memiliki komitmen tinggi untuk memupuk kepercayaan masyarakat melalui penguatan integritas seluruh praktisi/pelaku industri jasa keuangan, khususnya integritas insan OJK sendiri. Beberapa program penguatan integritas OJK di antaranya adalah membangun fungsi, strategi, dan sistem antifraud, pelaksanaan program pengendalian gratifikasi, serta revitalisasi OJK Whistle Blowing System (OJK WBS).

OJK WBS adalah sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK. OJK WBS menggunakan 5 Prinsip:

1. *Commitment At Top Level*
2. *System Integrity*
3. *Blower Protection*
4. *Communication*
5. *Accessibility*



• Pengembangan Kapasitas Organisasi Hubungan Kelembagaan Domestik



MOU OJK bersama Aisyiyah

Pengembangan Keuangan Syariah, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan



MOU OJK bersama Pengurus Pusat Bhayangkari

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Anggota Bhayangkari



MOU OJK bersama Kementerian Perdagangan

Penyediaan Informasi dan Saluran Pengaduan Konsumen Melalui Portal Nasional Perlindungan Konsumen



MOU OJK bersama Telkom University

Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan



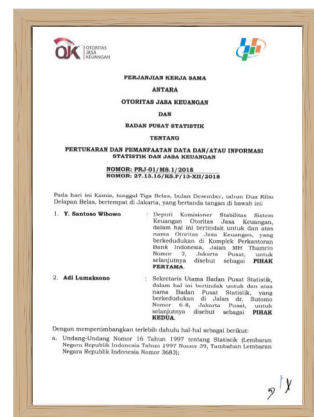
Nota Kesepahaman dengan Universitas Gadjah Mada

Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Dukungan Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan

- Pengembangan Kapasitas Organisasi** **Hubungan Kelembagaan Domestik**

Perjanjian Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS)

1. Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2016.
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut, antara lain:
 - a. Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan informasi;
 - b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang statistik dan jasa keuangan;
 - c. Sosialisasi dan edukasi sesuai tugas dan fungsi para pihak;
 - d. Penelitian dan pengembangan dalam bidang statistik dan jasa keuangan; dan
 - e. Kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing pihak.
3. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman tersebut, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputy Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan-OJK dan Sekretaris Utama-BPS pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.
4. Tujuan dari penyusunan PKS ini adalah untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, kerja sama, dan sinergi antara OJK dan BPS dalam rangka Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik dan Jasa Keuangan, termasuk antara Kantor Regional/Kantor OJK (KR/KOJK) dengan Kantor BPS di daerah.



◉ Pengembangan Kapasitas Organisasi

Hubungan Kelembagaan Internasional



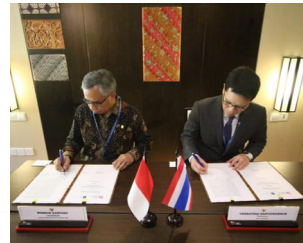
Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Letter of Intent (LoI)* dengan beberapa Lembaga Sektor Keuangan Internasional selama 2018 antara lain:



MoU OJK dan IFC terkait Pengembangan Program Keuangan Berkelanjutan telah ditandatangani pada 20 April 2018



MoU OJK dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) tentang Financial Technology telah ditandatangani pada 11 Oktober 2018

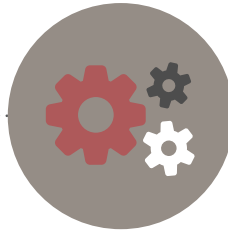


MoU OJK dengan Bank of Thailand tentang Pengawasan Perbankan Lintas Batas dan Pertukaran Informasi telah ditandatangani pada 12 Oktober 2018

• Pengembangan Kapasitas Organisasi Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja



OJK telah memiliki mekanisme manajemen strategi yang mengacu pada sistem *Balanced Scorecard*



Sistem *Balanced Scorecard* tersebut diaplikasikan didalam OJK melalui Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (Sistem MSAK) yang mengatur Manajemen Strategi, Manajemen Anggaran dan Manajemen Kinerja



Untuk melaksanakan sistem MSAK dengan baik melalui pelaksanaan pengelolaan kinerja yang sesuai dengan *governance*, OJK telah memiliki sistem pengelolaan kinerja yang komprehensif yaitu SIMPEL OJK



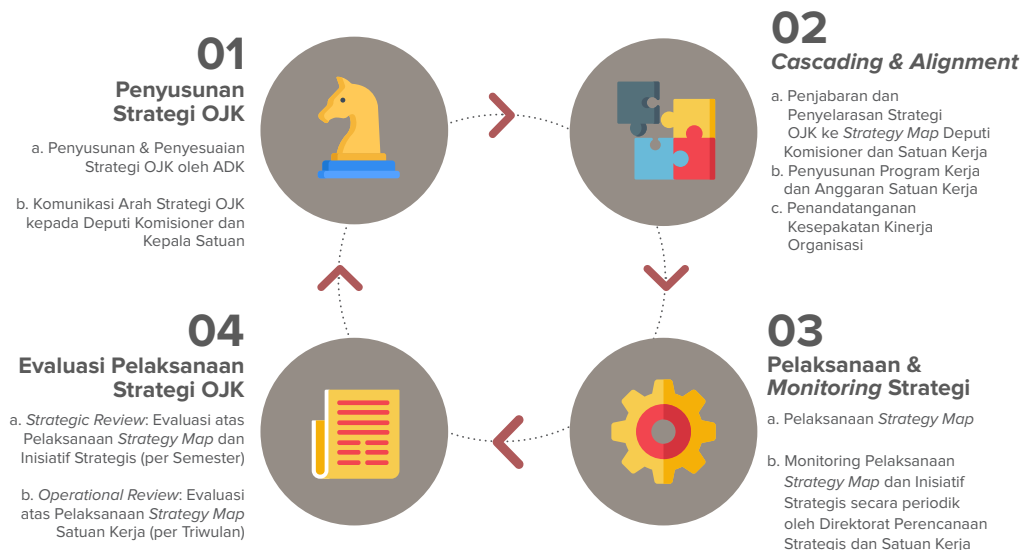
Sistem pengelolaan kinerja telah dihubungkan dengan penilaian kinerja individual pegawai dan mempengaruhi remunerasi dan insentif pegawai

Pengembangan Kapasitas Organisasi **Manajemen Strategi, Anggaran** **dan Kinerja**

Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja yang selanjutnya disingkat Sistem MSAK adalah suatu sistem yang mengintegrasikan:



Siklus Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



- Pengembangan Kapasitas Organisasi** **Penilaian Kinerja**



• Pengembangan Kapasitas Organisasi

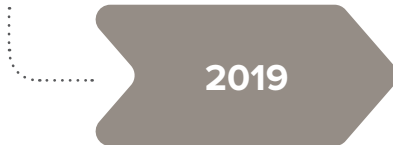
Roadmap Visi OJKway 2022

Program Praktik Kerja Lapangan



Insan OJK Sigap

Pembentukan Perilaku Proaktif



Insan OJK Handal

Penguatan Budaya Belajar Berkelanjutan



Insan OJK Terampil

Utilisasi Infrastruktur Pendukung Kinerja Berbasis IT



Insan OJK Inovatif

Inovasi Berkelanjutan Perbaikan Proses Kerja



OJK Proaktif

5.2



OJK Inspiratif

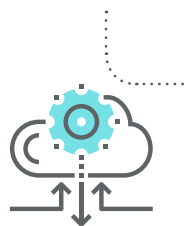
5.8



OJK Inovatif

5.8

5,6
Skala 6



Insan OJK Kredibel

Profesionalisme dan Kredibilitas Insan OJK

• Pengembangan Kapasitas Organisasi

Program Budaya Kerja OJKway 2018



Program pembentukan perilaku proaktif Insan OJK, yaitu perilaku mengambil inisiatif untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* sesegera mungkin.

Survey Kepuasan *Stakeholders*



5,4
Skala 6



Program memperkuat rasa kepedulian terhadap sesama dan sinergi lintas satker melalui *knowledge sharing* lintas satker maupun eksternal, serta program sosial lainnya.

OJK Mengajar



Pemberdayaan Masyarakat

68
Program

Contoh Program:

1. Pemberdayaan UMKM
2. Pengelolaan Bank Sampah
3. Pelatihan Pengelolaan Keuangan
4. Budidaya Tanaman
5. Pelatihan Keterampilan
6. Bantuan sosial

Artikel

646
Artikel

Topik:

1. Budaya Kerja
2. Transformasi
3. Kepemimpinan
4. Manajemen Kinerja
5. Manajemen Sumber Daya

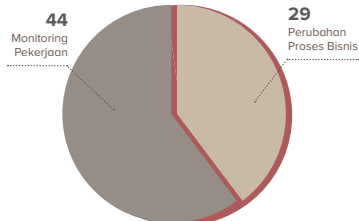
Knowledge Sharing

568
Pertemuan

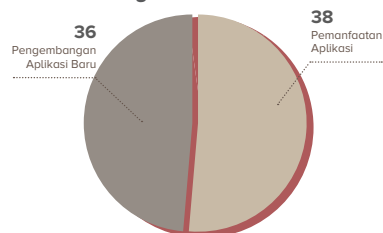


Program percepatan proses kerja satker melalui pengembangan/ *enhancement* sistem pendukung kinerja atau *re-engineering* proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien.

Jenis Program



Metode Program



o Pengembangan Kapasitas Organisasi

Program OJK Inspiratif: Pemberdayaan Masyarakat

Manajemen Strategis 1

DKST Pemberdayaan UMKM di Purwakarta
 DMSP Pemberdayaan pedagang minuman keliling, Senen
 DOSM Budidaya Hidroponik, Sukabumi
 GPTI Pengajaran dan memberi modal kerja garmen, Bogor
 GPUT Pelatihan wirausaha, Bekasi
 SKHI Pembuatan buku adik asuh Riska, Jakarta
 GP3T Program Menjahit, Budidaya Lele dan Hidroponik

Manajemen Strategis 2

DHUK Wirausaha menjual Thai Tea, Jakpus
 DKEU Buka puasa anak yatim, Wismul
 DLAC Bantuan Sosial untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia
 DPSI Pelatihan Kerajinan Tangan dari koran, Kuningan

Pengawas Pasar Modal

PM1 Bank Sampah, Kayumanis
 PM2 Memasak Bersama Bogasari, Cililitan
 PM3 Bantuan jasa pemasaran madu Badui, Jakpus
 PM4 Pelatihan Decoupage, Jaktim

Pengawas Perbankan

DKIP JUDO (aJak unit Usaha menjaDi prOduktif), Jakarta
 DPB1 Pengelolaan Sampah, Jakpus
 DPB2 Belajar Hidroponik dan Berbagi Bersama, Jakarta
 DPB3 "Jelantah Bersih", Bogor
 DPBS Asinan Binari, Depok
 DPIP RPTRA Sungai Bambu, Jakarta
 DPKP Wirausaha Mandiri, Lebak bulus
 DPMK Seni Daur Ulang, Jakarta
 DPNP Pemberian Buku ke anak asuh, Jakarta

AIMRPK

DPAI Pengelolaan sampah, Cakung
 DRPK Goresan Kata Tunanetra DRPK, Jakarta
 GPAF Pembekalan teknik menjahit

Pengawas IKNB

DPI1 Pembekalan keuangan, Cibinong
 DPI2 Pembuatan Laporan Keuangan,Tegal
 DPI3 Pelatihan UMKM, Purwakarta
 DPI4 Bantuan Sosial, Jaktim

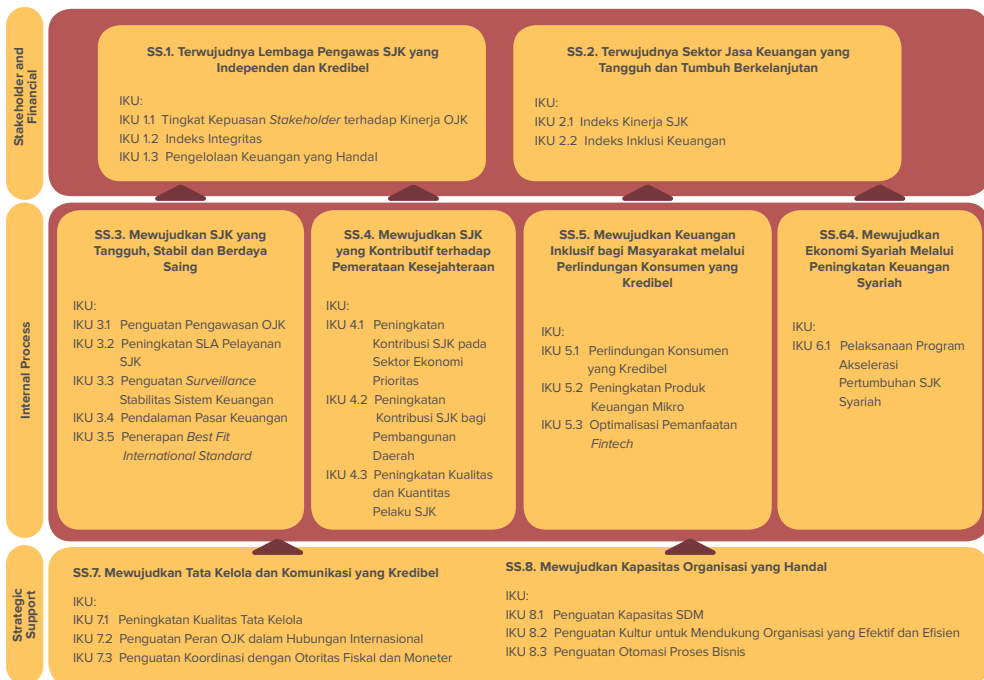
Edukasi & Perlindungan Konsumen

DPLK Budidaya Hidroponik, Bogor
 DLIK Pemanfaatan botol bekas, Gambir

Kantor Regional & OJK

KR1	Bantuan Peralatan Baking	KOJK Cirebon	Pendampingan bank sampah	KOJK Jambi	ANTRI-PRENEUR
KR2	Workshop Pemberdayaan Wanita	KOJK Tasikmalaya	Pelatihan pembuatan bros rajut	KOJK Bengkulu	Revitalisasi konservasi penyu
KR3	Pemberdayaan Kaum Difabel	KOJK Solo	Pemilahan dan Pengelolaan Sampah	KOJK Sulteng	Pembuatan Rumah Bintang Mangrove
KR4	Workshop Pemberdayaan Jualan Online	KOJK Tegal	Pembekalan usaha Hidroponik & decoupage	KOJK Sultra	Pembekalan ilmu UMKM kepada mahasiswa
KR5	Pemberian Donasi	KOJK Purwokerto	Pembukaan & donasi tabungan SIMPEL	KOJK Sulut	Peningkatan pemasaran dari pengusaha pisang
KR6	Pemberian Santunan	KOJK Jember	Pelatihan pembuatan souvenir & hantaran	KOJK Maluku	Pengelolaan teh aroma pala & Minyak atsiri
KR7	Budidaya Hidroponik Plant & Ternak Lele	KOJK Kediri	Pemberdayaan Hidroponik & Aquaponik	KOJK Papua	Membuat klub baca di SD Tobati
KR8	Pelatihan produk lembaga keuangan & akuntansi keuangan BUMDES	KOJK Aceh	Knowledge sharing peningkatan ekonomi	KOJK NTB	Sekolah Budidaya Jamur
KR9	Pengajaran pembuatan bros & manik Pantl Asuhan	KOJK Malang	Pelatihan Decoupage & teknik pemasaran	KOJK NTT	Donor darah & pembuatan lubang resapan air
		KOJK Kepulauan Riau	Kewirausahaan Pantl Asuhan	KOJK Kalbar	Pembekalan kewirausahaan usaha Sate Taichan
		KOJK Riau	Budaya menabung ke anak Pantl	KOJK Kalteng	Pembuatan usaha baru bagi masyarakat
		KOJK Sumatera Barat	Bantuan sosial masyarakat	KOJK Kaltim	Edukasi menabung & perencanaan keluarga
		KOJK Lampung	JARING & pemeriksaan kesehatan		
			Capacity building & soft skill kewirausahaan		

Peta Strategi OJK Wide 2018



Bab 6

Outlook Sektor Jasa Keuangan 2019



• Outlook

Perekonomian Dunia

- Dalam *World Economic Outlook* Oktober 2018 IMF merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini menjadi sebesar 3,7%. Koreksi tersebut dipengaruhi oleh revisi pada pertumbuhan PDB Uni Eropa dan *emerging markets*. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan akan tetap solid.
- PDB Uni Eropa diperkirakan melemah sebagai akibat ekspor yang cenderung stagnan. Di *emerging markets*, revisi ke bawah disebabkan oleh meningkatnya tekanan di pasar keuangan negara-negara tersebut.
- Pertumbuhan perdagangan dunia diprediksi termoderasi, dipengaruhi oleh meningkatnya tensi perang dagang yang belum menunjukkan indikasi penurunan.
- Sementara itu, harga komoditas diproyeksikan terus meningkat, akibat meningkatnya permintaan di *advanced economies*. Tren kenaikan harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut.

PDB (% yoy)	2016	2017	2018	
			WEO, April 2018	WEO, Okt 2018
AS	1,6%	2,4%	2,9%	2,9%
Jepang	1,0%	1,7%	1,2%	1,1%
Uni Eropa	1,8%	1,7%	2,4%	2,0%
Tiongkok	6,7%	6,9%	6,6%	6,6%
EM	4,3%	4,7%	4,9%	4,7%
AE	1,7%	2,3%	2,5%	2,4%
Dunia	3,2%	3,7%	3,9%	3,7%

Sumber: IMF

(% yoy)	2016	2017	2018	
			WEO, April 2018	WEO, Okt 2018
Trade Volume	2,2%	5,2%	5,1%	4,2%
Harga Komoditas				
Minyak	15,7%	23,3%	28,0%	31,4%
Non-Minyak	-1,5%	6,8%	5,6%	2,7%

Sumber: IMF

• Outlook

Perekonomian Indonesia

% yoy	2018F		2019F	
	PDB	Inflasi	PDB	Inflasi
OJK	5,16%	3,5%	5,2%-5,3%	4,0%
Kementerian Keuangan	5,2%	3,5%	5,3%	3,5%
Bank Indonesia	5,0%-5,4%	3,5±1%	5,1% - 5,5%	3,5±1%
Lembaga Penjamin Simpanan	5,3%	3,7%	5,5%	3,5%
International Monetary Fund	5,1%	3,4%	5,1%	3,8%
Asian Development Bank	5,2%	3,4%	5,3%	3,5%
World Bank	5,2%	3,5%	5,2%	3,7%
OECD	5,2%	3,6%	5,3%	3,7%

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,3% di tahun 2019, meningkat dibandingkan tahun 2018, sesuai dengan tren perbaikan indikator-indikator sektor riil. Inflasi diperkirakan bergerak stabil walaupun cenderung berada pada batas atas yang telah ditetapkan otoritas moneter.

Bab 7

Arah Strategis OJK 2019



• Peta Strategi OJK Wide 2019



• Program Kerja Prioritas 2019



Mewujudkan SJK yang Tangguh, Stabil Berdaya Saing dan Tumbuh Berkelanjutan

- Mengembangkan dan melaksanakan pengawasan SJK berbasis Teknologi Informasi
- Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
- Mengimplementasikan standar internasional prudensial yang sesuai dengan kondisi perekonomian nasional
- Reformasi IKNB untuk Mewujudkan IKNB yang Kuat dan Berdaya Saing
- Efisiensi di IJK untuk Mewujudkan IJK yang Berdaya Saing



Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan

- Mengoptimalkan Peran *Financial Technology* melalui Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan yang Memadai
- Mendorong Peningkatan Peran Serta Keuangan Syariah dalam Mendukung Penyediaan Sumber Dana Pembangunan
- Revitalisasi Pasar Modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang
- **2019**
Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri berorientasi ekspor dan substitusi barang impor, sektor pariwisata, serta sektor perumahan



Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Handal untuk Mendukung Terciptanya Keuangan Inklusif

- Mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan
- Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen



Mewujudkan Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel didukung Kapasitas Internal yang Handal

- Penguatan Organisasi dan Kapasitas SDM
- Efektifitas Pengelolaan Keuangan OJK
- Kemandirian Gedung baik di kantor pusat maupun di KR/KOJK
- Aspek Pemanfaatan Teknologi Komunikasi
- Komunikasi domestik dan Internasional
- Pengembangan riset Sektor Jasa Keuangan

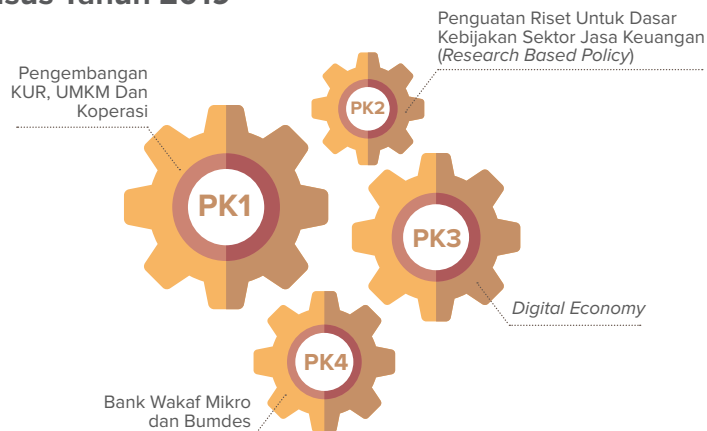
• Inisiatif Strategis dan Proyek Khusus 2019

Untuk mempercepat pencapaian Sasaran Strategis, maka OJK melanjutkan Inisiatif Strategis OJK yang bersifat lintas sektoral dan 3 Proyek Khusus yang telah dilaksanakan selama 2018 serta menambahkan 2 Inisiatif Strategis dan 1 Proyek Khusus Baru di 2019.

Inisiatif Strategis OJK Tahun 2019



Proyek Khusus Tahun 2019





Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo J
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
Fax. 62 21 385 7917

 www.ojk.go.id

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [@ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)

 Kontak OJK 157